

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Juni II Tahun 2021 No. 16

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A

*Ngotot Capres
Periode Ketiga*

**Tindakan
Inkonstitusional**

Memalukan, Wacanakan Presiden Tiga Periode Kala Pandemi Berkecamuk

KUTIPAN

"Belanda masih jauh" sebuah ungkapan yang mampu menggambarkan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Terlalu pagi, tidak tepat momentnya dan tak pantas.

Anehnya wacana presiden tiga periode menyeruak di kala pandemi makin parah, sebab utamanya karena manajemen pengendalian wabah yang buruk. Fixed luka nalar telah terjadi secara paripurna.

Pihak yang mengusung wacana ini harusnya malu dan menyimpan sedikit empati; bahwa hari ini Rumah Sakit penuh, taman pemakaman umum sesak, tenaga medis kelelahan dan orang terpapar masif. Syahwat kuasa memang telah membuatkan mata hati.

Dalam sebuah laporan investigasi media disampaikan ide wacana (kasak kusuk) tiga periode ini datang dari istana, tempat yang harusnya menjadi singgasana penjaga nalar. Tempat amanah ditunaikan untuk mensejahterakan dan memberi rasa aman.

Jika benar wacana ini menjadi kenyataan, bukan saja melanggar konstitusi tapi juga mengkhianati cita-cita reformasi. Kita seperti membiarkan penumpang gelap membajak kapal demokrasi. bukan hanya oleng, namun juga membuat kebocoran yang menenggelamkan cita-cita bangsa.

Disaat belahan bumi lain berlomba - lomba mendeklarasikan membuka masker, karena keberhasilan vaksinasi dan protokol kesehatan. Disini malah masker harus digunakan dua lapis, akibat program vaksinasi yang terlampau rijit, penuh kontroversi dan seremoni. Ditambah dengan kebijakan yang mudah berganti, pragmatis dan politis.

Covid semakin hari dijadikan komoditas; seakan dinegosiasikan dan di uji tawar.

Basis ilmiah sudah lama ditinggalkan, tawaran para epidemolog diabaikan. Kita menjalani new normal dalam kondisi wabah berkecamuk. Covid telah dijadikan alasan dan diabaikan untuk sebuah kepentingan. Terlalu banyak program yang tidak menyentuh persoalan wabah seperti UU Cipta Kerja, Ibu kota negara (IKN) baru, RUU KUP yang didalamnya ada PPN sembako, usulan Tax Amnesty jilid II dan lain sebagainya. Bukti tidak jelas ujung dan pangkal.

Tengok saja jika sebuah regulasi di desak hanya untuk alasan kepentingan semata, pada akhirnya ditingkat realisasi terjadi kedodoran; insentif nakes terlambat, hutang negara menumpuk, bansos yang dikorupsi, kebijakan penyekatan tak efektif dan lain sebagainya. Alarm sudah berbunyi sangat kencang, tak terdengarkan?

Mari bergandengan tangan dengan cara yang benar, kadang kita harus menggenggam erat agar tidak terjatuh. Diantaranya dengan lapang terima kritikan, masukan yang berbeda dan saran pahit sekalipun. Bukan malah

Jika benar wacana ini menjadi kenyataan, bukan saja melanggar konstitusi tapi juga mengkhianati cita-cita reformasi. Kita seperti membiarkan penumpang gelap membajak kapal demokrasi. bukan hanya oleng, namun juga membuat kebocoran yang menenggelamkan cita-cita bangsa.



bergandengan tangan dengan mendorong dan mengembuskan angin halus pada langkah yang salah.

Jiwa yang terpapar tak boleh hanya dilihat sebagai saling membantu. Bukan justru menegasikan dan mengambil manfaat.

berharga maka negara harus jadi pembela paling utama. Hadirkan rasa aman dan ciptakan ruang bersama untuk saling membantu. Bukan justru menegasikan dan mengambil manfaat.

HNW: Ngotot Majukan Capres Untuk Periode Ketiga, Tindakan Inkonstitusional

KUTIPAN

Jakarta (20/06) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid menilai,

bahwa pihak-pihak yang ngotot memajukan seseorang menjadi calon presiden hingga periode ke III, seperti memajukan Jokowi dengan peresmian Sekretariat Nasional (Seknas) untuk memajukan Jokowi sebagai Calon Presiden untuk periode ketiga, sebagai tindakan inkonstitusional, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan spirit dan teks konstitusi UUDNRI 1945 yang berlaku di Indonesia saat ini.

HNW sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Pasal 7 UUD NRI 1945 yang masih berlaku saat ini secara tegas mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun, dan hanya boleh dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

“Artinya, masa jabatan Presiden hanya dua periode saja. Jadi, kalau ada yang

ngotot mencalonkan kembali seseorang seperti Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat dua periode, itu tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku, karenanya manuver seperti itu bisa dinilai inkonstitusional,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Minggu(20/06).

Lebih lanjut, HNW mengatakan peresmian Seknas yang mengusung Joko Widodo sebagai Capres untuk periode ketiga tersebut bisa diartikan sebagai mendorong Presiden Jokowi untuk mengabaikan ketentuan konstitusi dan melaksanakannya sesuatu yang tidak dibenarkan oleh konstitusi.

Bila demikian, lanjutnya, maka akan memposisikan Presiden Jokowi berhadapan dengan konsistensi atas pernyataannya sendiri yang tegas dan berulang kali disampaikan bahwa dirinya

tidak setuju, tidak mau dan tidak minat dengan wacana tiga periode masa jabatan presiden.

“Bahkan, terkait wacana tiga periode masa jabatan itu, Presiden Jokowi telah secara berulang, dan tegas menyebutkan bahwa dirinya menolaknya, dan menyampaikan bahwa yang mengusulkan itu sebagai pihak yang mencari muka, atau bahkan menjerumuskan dan menampar muka dirinya. Yang demikian itu tentunya karena Presiden Jokowi menyadari bahwa dirinya produk Reformasi yang memberlakukan UUD dengan pembatasan masa jabatan Presiden. Selain tentu Beliau juga tahu bahwa sesuai UUDNRI 1945 (Pasal 6A ayat 2) yang mengajukan calon Presiden bukan SekNas atau survey, tapi Partai Politik. Dan tidak ada Parpol yang mengusulkan perubahan UUD untuk memperpanjang masa jabatan Presiden, bahkan PDIP melalui Ketumnya maupun Waket MPR dari PDIP, sudah tegas menyampaikan sikap tidak setuju perubahan pasal 7 UUDNRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden,” tuturnya.

Maka, menurut Wakil



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

“Masa jabatan Presiden hanya dua periode saja. Jadi, kalau ada yang ngotot mencalonkan kembali seseorang seperti Presiden Joko Widodo yang sudah menjabat dua periode, itu tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku, karenanya manuver seperti itu bisa dinilai inkonstitusional”

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, semestinya semua pihak legowo dan mendukung penguatan praktik demokrasi yang konstitusional, dengan

menaati aturan konstitusi yang berlaku antara lain soal masa jabatan Presiden hanya dua periode saja.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Ketua Fraksi PKS DPR RI Ajak Masyarakat **Teladani** **KH Abdul Wahab Chasbullah:** Perintis Dakwah Aswaja dan Pejuang Kemerdekaan Indonesia

KUTIPAN

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyambut penuh hormat Haul KH Abdul Wahab Chasbullah, tokoh pendiri Nahdatul Ulama bersama KH Hasyim Asyari

yang akan dilaksanakan terpusat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang Jawa Timur (Selasa, 22 Juni 2021). Acara ini akan disiarkan secara live melalui 250 youtube channel pukul 19.00.

Jazuli Juwaini menghimbau seluruh masyarakat, khususnya kader-kader PKS, untuk mengikuti Haul KH Wahab Chasbullah dengan seksama untuk mengambil keteladanan yang luar biasa dari Beliau rahimahullah.

Menurut Jazuli, KH Wahab Chasbullah adalah ulama besar yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita semua menghormati beliau

sebagai perintis dakwah *ahlusunnah wal jamaah* dan pejuang kemerdekaan Indonesia.

"Beliau teladan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia khususnya umat Islam. Perjuangannya untuk menyatukan umat dan rakyat Indonesia sangat kita hormati. Sehingga beliau sangat layak menjadi Pahlawan Nasional yang dikukuhkan sejak tahun 2014," ungkap Jazuli.

KH Wahab Chasbullah yang lahir pada 31 Maret 1888 ini, menurut Anggota Komisi I DPR Dapil Banten, tak henti-hentinya melakukan ijtihad demi menyatukan dan

memajukan rakyat Indonesia yang saat itu dikepung penjajahan, kebodohan, kejumudan dan ancaman perpecahan.

"Berturut-turut beliau mendirikan Nahdatul Wathon atau Kebangkitan Negeri pada tahun 1916 untuk menggelorakan semangat juang rakyat melawan penjajah. Lalu, Nahdatul Tujjar atau Kebangkitan Pedagang pada tahun 1918 sebagai pusat penggalangan dana untuk membiayai dakwah dan kemerdekaan Indonesia," terangnya.

Beliau juga mendirikan kelompok diskusi pemikiran Tashwirul Afkar pada tahun 1919 untuk mencerdaskan dan membuka cakrawala pemikiran umat, menjadi simpul komunikasi antar elemen umat, juga untuk kaderisasi intelektual di kalangan umat Islam. Selanjutnya, beliau punya peran besar dalam merintis kelahiran Nahdatul Ulama atau Kebangkitan Ulama bersama



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Beliau teladan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia khususnya umat Islam. Perjuangannya untuk menyatukan umat dan rakyat Indonesia sangat kita hormati. Sehingga beliau sangat layak menjadi Pahlawan Nasional yang dikukuhkan sejak tahun 2014”

Hadratussyaikh KH Hasyim Asyari, yang kita kenal sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia hingga kini. Ketika Resolusi Jihad diserukan oleh Hadratussyaikh, KH Wahab

adalah panglima lapangan yang memastikan implementasinya di seluruh wilayah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Sultan Pertimbangkan Yoga Lockdown,

PKS Minta Pusat **Dengarkan** Usulan Pemda

KUTIPAN

Jakarta (22/06) — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mempertimbangkan akan memberlakukan lockdown jika warga DIY sulit disiplin protokol kesehatan.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meyakini jika Sri Sultan HB X melakukan lockdown pasti sudah melalui pertimbangan matang.

"Ngarso Dalem punya pertimbangan matang. Jika usulan lockdown diajukan maka itu pasti dengan pertimbangan matang," kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (19/6/2021).

Anggota Komisi II DPR ini meminta agar pemerintah mulai mendengarkan keputusan pemerintah daerah. Sebab menurutnya dampak paling berat terhadap Corona ada pada pemerintah daerah.

"Pemerintah pusat mesti lebih banyak mendengar pemerintah daerah. Kebijakan umum seperti prokes, 3M dan vaksinasi domain pemerintah pusat, tapi usulan pengetatan suara pemerintah daerah perlu didengar. Karena dampak

paling berat ada pada pemda," ucap Mardani.

Tak hanya itu, Mardani juga menyarankan agar pemerintah pusat mulai mempertimbangkan untuk melakukan pengetatan. Dia menyebut pemerintah pusat terlalu jauh sensornya untuk membaca kondisi pandemi Corona.

"Sultan pasti mendengar dan membaca kondisi daerahnya. Pemerintah pusat kejauhan sensornya untuk merasakan itu. (Ikuti pemerintah daerah) khusus untuk pengetatan. Kalau pembukaan atau pelonggaran monggo pemerintah pusat yang atur," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mempertimbangkan akan memberlakukan lockdown jika warga DIY sulit disiplin protokol kesehatan. Hal itu untuk menekan kasus virus Corona

atau COVID-19 di DIY yang beberapa hari ini melonjak.

"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," tegas Sultan saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kemantren Danurejan, Jumat (18/6/2021).

Sultan menjelaskan pemerintah selama ini telah mengatur selayaknya dari RT dan RW. Hal tersebut sebenarnya sebagai antisipasi terjadi penularan di lingkungan. Tapi dalam pelaksanaan, lanjut Sultan, ternyata PPKM ini tak bisa berjalan efektif. Bahkan, kasus baru harian positif Corona di DIY mencapai di atas 500 orang beberapa hari kemarin.

"Kemarin (Ingub No 15/ INSTR/ 2021) maunya ada keputusan izin kelurahan harus sampai atasan (camat) gitu loh dan sebagainya dengan harapan semakin ketat masyarakat (tidak berkerumun) gitu, tapi kalau masih tembus arep apa meneh (mau apa lagi) kebijakannya). Ya lockdown," jelasnya.

Sultan melihat peningkatan kasus positif Corona di



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

“Pemerintah pusat mesti lebih banyak mendengar pemerintah daerah. Kebijakan umum seperti prokes, 3M dan vaksinasi domain pemerintah pusat, tapi usulan pengetatan suara pemerintah daerah perlu didengar. Karena dampak paling berat ada pada pemda”

DIY yang naik tersebut tak terlepas dari tingkat kedisiplinan masyarakat. Itu diperkuat dengan tracing yang tertular dari kasus positif.

“Selama masyarakat sendiri tidak mengapresiasi dirinya sendiri untuk disiplin,” ujarnya.

Dukung Kemlu RI Bongkar Kebohongan Dubes Israel, HNW: Bersama Malaysia dan Brunei **Boikot Produk Israel**

KUTIPAN

Jakarta (21/06) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendukung sikap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang membongkar ketidakjujuran Dubes Israel di Singapura yang menyebar berita bohong terhadap pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei soal akar masalah dari konflik di Palestina.

Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, sebagaimana diberitakan Reuters, menyatakan bahwa bahwa negara mayoritas muslim di Asia Tenggara termasuk Indonesia gagal paham soal konflik Israel-Palestina, bahwa konflik yang terjadi bukan antara Israel dengan Palestina, melainkan dengan Hamas.

Pernyataan terbuka ini, menurut Hidayat, selain merupakan kebohongan publik juga merendahkan nalar dan kualitas sikap mensejarah Pemerintahan di Asia Tenggara yang mayoritasnya Muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei, seolah mereka buta sejarah

dan tak membaca informasi berbilang puluhan tahun, bahwa akar masalah bukan dengan Hamas yang baru lahir tahun 1987, melainkan dengan penjajahan yang dilakukan oleh israel terhadap Palestina dengan mendeklarasikan berdirinya negara israel tahun 1948 di atas tanah Palestina yang merekajarah dan jahah.

"Kejahatan penjajahan Israel dalam eskalasi yang makin brutal dan mengabaikan resolusi dan keputusan-keputusan PBB maupun lembaga internasional lainnya sudah dilakukan penjajah Israel jauh hari sebelum Hamas lahir,

dan masih terus berlangsung sesudah Hamas lahir. Karenanya Pemerintah maupun Rakyat Indonesia sudah memiliki sikap final yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, serta sikap dari semua Presiden Indonesia dan Parlemen Indonesia bersepakat dengan sikap bangsa atau rakyat Indonesia yaitu menolak penjajahan Israel dan mendukung perjuangan Bangsa Palestina untuk merdeka secara penuh dengan ibukota Jerusalem Timur," disampaikan Hidayat dalam keterangannya, Minggu (20/06/2021).

Hidayat menjelaskan, Pada tahun 1962, Bung Karno, Presiden RI yang memahami dengan baik dan benar akar masalah di Palestina yaitu penjajahan Israel, dengan lantang menyatakan "Selama kemerdekaan belum sepenuhnya diberikan kepada Palestina, maka selama itu jugalah Indonesia menentang penjajahan Israel".

Oleh karena itu, kata Hidayat, memperhatikan perkembangan di Palestina yang kembali menyaksikan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

"Pernyataan terbuka ini, selain merupakan kebohongan publik juga merendahkan nalar dan kualitas sikap mensejarah Pemerintahan di Asia Tenggara yang mayoritasnya Muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei, seolah mereka buta sejarah dan tak membaca informasi berbilang puluhan tahun."

perang Israel, serta tuduhan bohong yang melecehkan pemerintah Indonesia.

HNW sapaan akrabnya mengusulkan agar ini jadi momen bagi Pemerintah Indonesia untuk kembali menyerukan sikapnya untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan negara penjajah Israel, dan karenanya merealisasikan

seruan Presiden Jokowi pada tahun 2016 untuk memboikot produk Israel, dikongkretkan antara lain dengan blokade terhadap produk Israel ke Indonesia juga negara mayoritas muslim lainnya di Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan
Sabtu, pukul 10.00 WIB
hanya di:

 youtube **PKSTV DPR RI**



Komisi I DPR Dorong Peningkatan Pengamanan Wilayah Lanud I Gusti Ngurah Rai

KUTIPAN

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis mendorong peningkatan pengamanan wilayah Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Menurutnya, pengamanan wilayah Lanud Ngurah Rai perlu ditingkatkan agar siap dalam mengamankan berbagai potensi ancaman yang akan datang. Pasalnya Lanud Ngurah Rai ini menjadi salah satu pintu masuk wilayah Indonesia.

"Komisi I DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja ke Lanud I Gusti Ngurah Rai ini untuk melihat dari jarak dekat bagaimana kondisi Lanud ini sebenarnya. Karena lanud Ngurah Rai juga merupakan pintu masuk tamu-tamu yang akan datang ke Indonesia, di samping Jakarta," jelas Kharis usai pertemuan dengan Danlanud I Gusti Ngurah Rai beserta jajarannya di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Senin (21/6/2021).

Karena itu, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut ingin memastikan agar Lanud I Gusti Ngurah Rai bisa memberikan keamanan, khususnya dalam menjaga keamanan wisatawan asing maupun domestik yang akan berkunjung ke Bali. Namun di samping itu, ia juga menjelaskan bahwa kunjungan ini juga menjadi penting karena dalam rangka Panja Alutsista TNI mengamati kondisi alutsista di Lanud I Gusti Ngurah Rai.

Sebagai informasi, Komisi I DPR RI telah membentuk Panja Alutsista TNI dan Panja Kesejahteraan Prajurit. Muara dari kedua Panja tersebut adalah untuk penguatan TNI dalam mengemban tugas dan fungsi melalui ketersediaan alutsista yang ideal dan pemenuhan kesejahteraan

prajurit. Panja Alutsista Komisi I DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman terhadap pengadaan alutsista yang diajukan Kementerian Pertahanan/TNI.

"Di (Lanud I Gusti Ngurah Rai) sini tidak banyak alutsistanya. Namun kita lebih memberikan masukan untuk membantu pengamanan. Setelah kita (Komisi I DPR RI) lihat, saya kira secara jumlah personel Lanud Ngurah Rai sudah mencukupi, walaupun bisa dimaksimalkan pasti akan lebih baik lagi," jelas Kharis lebih lanjut.

Untuk itu, Kharis berharap agar peralatan dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan pengamanan wilayah Lanud I Gusti Ngurah Rai harus dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan guna mendukung pengamanan Bandara I Gusti Ngurah Rai maupun wilayah sekitar yang masuk dalam wilayah pengamanan Lanud I Gusti Ngurah Rai. (hnm/sf)



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

"Di (Lanud I Gusti Ngurah Rai) sini tidak banyak alutsistanya. Namun kita lebih memberikan masukan untuk membantu pengamanan. Setelah kita (Komisi I DPR RI) lihat, saya kira secara jumlah personel Lanud Ngurah Rai sudah mencukupi, walaupun bisa dimaksimalkan pasti akan lebih baik lagi,"

Junta Militer Myanmar Bakar Desa, Aleg PKS: Kebijakan ASEAN Harus Lebih Keras

KUTIPAN

Jakarta (18/06) — Pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN harus segera mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar yang terus melakulkan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Myanmar.

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta melalui pesan tertulis (18/06) merespon tindakan militer Myanmar yang membakar ratusan rumah di desa Kinma wilayah Magway yang hanya menyanakan 10 dari 237 rumah yang masih berdiri. Sisanya rata dengan tanah usai dilalap api.

"Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa ASEAN lagi-lagi tidak memiliki taji dalam konflik kemanusiaan di

negara anggotanya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara besar harus mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar," seru Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik, Hukum dan HAM ini.

Sukamta kemudian mengusulkan beberapa langkah lebih tegas dan keras yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

"Pertama, langkah diplomasi terus digalakan baik melalui ASEAN dengan mendorong negara-negara yang dekat dengan Myanmar untuk tidak mendukung junta militer Myanmar baik secara politik maupun ekonomi. Kedua, memutuskan hubungan

kerjasama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi dengan junta militer Myanmar. Ketiga, membawa masalah Myanmar ke sidang PBB dan mendorong PBB untuk turun tangan."

Langkah-langkah ini perlu segera dilakukan agar korban jiwa tidak terus berjatuhan, instabilitas di Myanmar bisa terbentuk. Langkah ini juga menguji signifikansi peran dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia.

Ramai diberitakan sebelumnya pembakaran ratusan rumah disebuah desa dilakukan oleh junta militer Myanmar. Junta militer Myanmar menggunakan cara bumi hangus untuk mematikan gerakan yang mereka sebut terorisme. Sebelumnya junta militer melakukan hal sama yaitu membakar banyak desa pada tahun 2017 silam sehingga menurut laporan PBB 740 ribu lebih etnis minoritas Rohingya terusir di wilayah Rakhine.



H. SUKAMTA, Ph.D.
Anggota Komisi I DPR RI

Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa ASEAN lagi-lagi tidak memiliki taji dalam konflik kemanusiaan di negara anggotanya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara besar harus mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar

PKS Minta Jokowi Lebih Tegas Menentang Ide 3 Periode

KUTIPAN

"Ide tiga periode membunuh demokrasi. Ide demokrasi mengkhianati nilai reformasi," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Jakarta - Sejumlah relawan membentuk sekretariat Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk Pilpres 2024. PKS menilai wacana jabatan tiga periode presiden mengkhianati reformasi.

"Ide tiga periode membunuh demokrasi. Ide demokrasi mengkhianati nilai reformasi," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Mengusung Jokowi menjabat presiden tiga periode secara langsung diwacanakan JokPro 2024. PKS menilai wacana ini berbahaya dan perlu ditentang.

"Sirkulasi kepemimpinan wajib bagi Indonesia yang maju dan sehat. Ide tiga periode berbahaya dan wajib dilawan,"

ujar Mardani.

Mardani mengatakan PKS tetap mendukung jabatan presiden dibatasi dua kali. Jokowi, kata Mardani, perlu lebih tegas menentang wacana jabatan presiden tiga periode.

"Sikap partai setahu saya dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi," ucap Mardani.

"Makanya Pak Jokowi perlu lebih tegas menentang ide tiga periode," imbuhnya.

Sejumlah relawan sebelumnya akan membentuk sekretariat Jokpro. Relawan tersebut sepakat mengusung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024.



Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

PKS tetap mendukung jabatan presiden dibatasi dua kali. Jokowi, perlu lebih tegas menentang wacana jabatan presiden tiga periode. Sikap partai setahu saya dua periode adalah kebijakan paling sesuai. Tiga periode bencana dan membunuh demokrasi, Makanya Pak Jokowi perlu lebih tegas menentang ide tiga periode



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SELAMAT HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL

26 Juni 2021

Jauhi Narkoba
Masa Depanmu
Sangatlah Berharga

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Sekjen DPP PKS



Tanggapi Kapolri dalam Raker Bersama Komisi III, Habib Aboe: Untuk Narkoba Harus Keras!

KUTIPAN

Jakarta (16/06) — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kapolri pada Rabu, 16 Juni 2021. Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi III FPKS DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menyampaikan pandangannya, khususnya mengenai kasus narkoba di Indonesia yang dari hari ke hari semakin memprihatinkan.

“Masalah narkoba, ini masalah besar bukan ringan. Tolong konsolidasi antara BNN dan Polri, ini mengenai nasib anak bangsa. Penanganan narkoba harus agak keras. Dalam hal ini, apa langkahnya? Biar jelas, karena jangan hanya tangkap tapi dimana barangnya? Bagaimana penyimpanannya dan bagaimana pemusnahannya? Jangan sampai orang curiga ternyata barangnya disitu-situ juga atau diputar kembali. Saya tidak percaya hal itu terjadi di kepemimpinan Pak Sigit, tetapi orang bertanya, karena

tangkapan ini besar terus. Kemana barang itu?”, pungkask legislator asal dapil Kalimantan Selatan ini.

Keresahan itu diungkap Sekjend PKS tersebut menyusul beredarnya berita pengungkapan sekaligus penangkapan kasus narkoba seberat kurang lebih 1,1 ton beberapa hari sebelumnya di 4 (empat) wilayah berbeda.

Selain narkoba, hal lain yang mendapat sorotan Aboe Bakar adalah mengenai terorisme, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme tanpa melanggar

HAM.

“Menyangkut masalah terorisme, apa langkah-langkah Polri dibawah kepemimpinan Pak Sigit untuk mengatasi masalah-masalah teroris tapi tidak melanggar HAM? Ini penting. Jangan sampai kita main tangkap tapi pelanggaran HAM-nya tinggi”, ujarnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD DPR RI) ini juga mewanti-wanti agar Polri dapat menggunakan support dari Komisi III berupa anggaran dengan sebaik-baiknya.

“Saya merasa dukungan Komisi III kepada Polri sudah sedemikian maksimal. Tolong harga dukung kami ini dalam bentuk anggaran yang lebih baik dari mitra yang lain. Ini sudah cukup bagus, semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya”, terangnya



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

“Masalah narkoba, ini masalah besar bukan ringan. Tolong konsolidasi antara BNN dan Polri, ini mengenai nasib anak bangsa. Penanganan narkoba harus agak keras. Dalam hal ini, apa langkahnya? Biar jelas, karena jangan hanya tangkap tapi dimana barangnya? Bagaimana penyimpanannya dan bagaimana pemusnahannya? Jangan sampai orang curiga ternyata barangnya disitu-situ juga atau diputar kembali. Saya tidak percaya hal itu terjadi di kepemimpinan Pak Sigit, tetapi orang bertanya, karena tangkapan ini besar terus. Kemana barang itu?”,

Raker Komisi III dengan Kapolri

Politisi PKS: Apresiasi Program Polri, sebagai Pintu Utama Restorative Justice

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun memberikan apresiasi kepada POLRI pada Rapat Kerja yang digelar Rabu, 16 Juni 2021 di Komisi III DPR RI.

Apresiasi tersebut ditujukan atas beberapa pencapaian Polri yang dipaparkan oleh Jend.Pol Listyo Sigit Prabowo dalam 'Program 100 Hari Kapolri'.

"Saya mengapresiasi yang sangat tinggi dengan naskah yang lengkap ini (paparan Kapolri), kita mendapat masukan yang mendalam", ujarnya.

Hal tersebut dalam rangka menanggapi dokumen paparan Kapolri yang lengkap dan cukup tepat terkait capaiannya selama ini.

"Kemudian, saya apresiasi dalam konteks aktifnya Polri dalam penanganan yang berhubungan dengan Covid-19", lanjut Legislator asal Dapil Jakarta ini.

Terkait adanya perubahan paradigma hukum secara global

menuju restorative justice system, Adang menggarisbawahi bahwa hal tersebut sangat dikehendaki oleh masyarakat dewasa ini.

"Pada saat saya berbicara dengan para mahasiswa Universitas Brawijaya dalam rangka membahas cyber police, pendekatan restorative justice ini sangat dikehendaki dan masuk akal. Ini berarti bahwa POLRI dalam konteks KUHAP merupakan pintu utama dalam menentukan restorative justice", pungkasnya.

Lebih jauh, mantan Wakapolri ini menjelaskan bahwa hal itu (pendekatan restorative justice) mempunyai arti bahwa SDM Polri sangat menentukan di lapangan.

"Sumber Daya Manusia

Polri ini sangat menentukan apakah proses hukum itu akan berlanjut ataukah diselesaikan secara berkeadilan, dimana dalam konteks di lapangan, saya berharap para pejabat yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah pejabat Polri yang mumpuni dalam menyelesaikan itu (restorative justice)", jelasnya.

Sebagai penutup, pria kelahiran Bogor ini tidak lupa memberikan apresiasi kepada Polda Sumatera Utara atas penyelesaian kerusakan lingkungan yang terjadi di Danau Toba, Sumatera Utara, yang akan menjadi tempat wisata nasional.

"Saya mengapresiasi Kapolda Sumatera Utara yang telah melakukan langkah-langkah yang begitu baik dalam rangka menyelesaikan masalah dengan masyarakat setempat, sehingga kerusakan lingkungan di Danau Toba itu dapat diatasi", tutupnya.



Drs. H. ADANG DARADJATUN
Anggota Komisi III DPR RI

"Sumber Daya Manusia Polri ini sangat menentukan apakah proses hukum itu akan berlanjut ataukah diselesaikan secara berkeadilan, dimana dalam konteks di lapangan, saya berharap para pejabat yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah pejabat Polri yang mumpuni dalam menyelesaikan itu (restorative justice)",

Anggota FPKS Terus Pantau Perkembangan Penanganan Kasus-kasus Besar yang Rugikan Negara

KUTIPAN

Jakarta (16/06) — Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimiyati Natakusumah menyampaikan sejumlah catatan kepada Jaksa Agung terkait penanganan kasus mega skandal yang merugikan keuangan negara.

“Kita menyadari bahwa kasus skandal keuangan dan tindak pidana pasar modal yang melibatkan Asuransi Jiwasraya dan Asabri merupakan kasus yang rumit dan kompleks namun sejauh ini kejaksaan tampaknya bekerja dengan cukup baik dan layak untuk diapresiasi. Namun dalam pelaksanaannya tentu masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dari institusi kejaksaan. Fraksi PKS akan terus memantau perkembangan kasus-kasus tersebut,” terangnya.

Pernyataan tersebut disampaikan mantan Bupati Pandegelang dua periode itu dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung di Komisi III DPR-

RI(14/6).

Dalam catatannya Dimiyati mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dalam melakukan Penelusuran harta (asset tracing) untuk mengembalikan kerugian negara dari sejumlah kasus-kasus besar.

“Dalam penanganan kasus Asabri misalnya, kejaksaan saat ini telah berhasil menyita sejumlah aset dengan nilai mencapai 13.7 Triliun Rupiah. Hal ini kiranya patut menjadi role model dalam penanganan kasus serupa di masa depan dimana upaya penal harus selaras dengan pengembalian aset kerugian negara,” urai anggota legislatif Fraksi PKS dari dapil Banten itu.

Dimiyati juga menyoroti

perlu nya perbaikan dalam hal pembinaan karir jaksa dan implemetansi restorative justice di kejaksaan.

“Dalam konteks manajemen SDM Jaksa Agung kiranya perlu untuk mengatur pengelolaan struktur organisasi dan sumber daya manusia secara lebih objektif dan terukur termasuk didalamnya untuk segera mengisi perangkat struktur organisasi Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer(Jampidmil),” terangnya.

Fraksi PKS, terang Dimiyati, turut mengapresiasi berlakunya Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif namun menuntut implementasi yang lebih konkrit dalam penanganan perkara di kejaksaan.

“Berlakunya peraturan jaksa agung tersebut selaras dengan paradigma pemidanaan kontemporer. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kejaksaan dapat mengimplementasikan peraturan tersebut secara konsisten. Kita cukup menyangkan penanganan



**DR. H. R. A. DIMIYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Komisi III DPR RI

“Dalam konteks manajemen SDM Jaksa Agung kiranya perlu untuk mengatur pengelolaan struktur organisasi dan sumber daya manusia secara lebih objektif dan terukur termasuk didalamnya untuk segera mengisi perangkat struktur organisasi Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer(Jampidmil”

perkara terhadap Habib Rizieq Shihab yang terkesan dipaksakan dan semestinya dapat dihentikan proses penuntutannya sesuai dengan semangat restorative justice. Kita berharap kejaksaan terus

mensosialisasikan peraturan tersebut terutama di internal kejaksaan sehingga disparitas penanganan perkara dapat ditekan,“pungkas penyandang gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran tersebut.

26 Juni 2021

HARI ANTI NARKOBA INTERNASIONAL



PKS meminta negara untuk mengoptimalkan kinerja pemberantasan narkoba yang berorientasi rehabilitasi dan revitalisasi.

■ Negeri banjir narkoba selama bertahun-tahun, di mana narkoba ini merupakan fenomena yang menimbulkan banyak masalah lain, termasuk merusak generasi muda bangsa.



■ Per 6 Mei 2021, ada **136.397 narapidana** kasus narkoba yang tersebar di seluruh lapas.

■ **24.878** orang ditangkap dari **19.229 kasus.**

■ Perkiraan Barang Sitaan Januari s.d Juni 2021

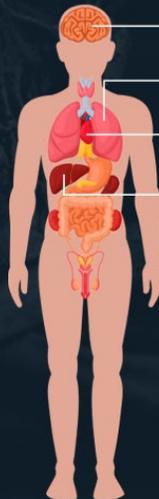
POLRI

- Ganja **2,14 ton**
- Sabu **6,64 ton**
- Gorila **34 ton**
- Ekstasi **239.277 butir**

BNN

- Ganja **0,5 ton**
- Sabu **1.87 ton**
- Ekstasi **183.089 butir**

■ Dampak Jangka Panjang Penggunaan Narkoba



13,1 %

Gangguan Kejiwaan

3,0 %

TBC

3,0 %

Kebocoran Katup Jantung

1,5 %

Sirosis Hati

Penyakit

6,8 %

Penyakit Seksual Menular

5,8 %

Penyakit Hepatitis C



Prevalensi pengguna narkotika di Indonesia **1.8%**

3,41 JUTA jiwa pengguna aktif

2,7 %

Penyakit AIDS

0,8 %

Penyakit Stroke

Anggota FPKS Dorong Perluasan Lahan Dan Insentif Khusus bagi Petani Kedelai

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mendorong pemerintah, agar ada perluasan lahan dan Insentif Khusus kepada petani kedelai.

Berbagai kesempatan rapat dengan kementerian pertanian di ruang sidang komisi IV pekan ini dan juga di saat kunjungan-kunjungan lapangan dalam fungsi pengawasan, Akmal meminta hal ini agar ada upaya mengatasi dampak kelangkaan kedelai dalam negeri yang dampaknya bukan saja pada para petani, tapi juga kepada masyarakat terutama pedangang tempe dan tahu.

"Kelangkaan kedelai yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kondisi alam yang kurang mendukung dan ketergantungan impor

semakin memicu persoalan yang tidak kunjung usai karena persoalan ini merupakan persoalan utama pada komoditas kedelai. Saya menyarankan ada perluasan lahan pertanian untuk kedelai dan pemberian insentif agar petani kedelai melihat ada harapan yang menjanjikan ketika menanam kedelai", ujar Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, pemerintah perlu menjaga stabilisasi produksi komoditas pangan hingga kondisi ekonomi para petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penentuan harga yang menarik dimana didukung dengan subsidi harga.

"Tapi semua itu perlu berproses terutama pembinaan dan pendampingan baik petani secara individu maupun secara kelembagaan. Karena hingga saat ini, banyak petani kedelai yang apatis ketika hendak berproduksi, yang disebabkan tidak ada kejelasan dukungan pemerintah yang menjadikan situasi pasar tidak bersahabat dengan petani lokal", kata Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan, saat ini pemerintah sudah berupaya dengan regulasi pupuk subsidi, bantuan alat mesin pertanian dan berbagai bantuan di bagian hulu seperti bibit. Tetapi ketika produk luar masuk dengan teknologi yang modern sehingga menghasilkan produksi yang efisien dengan harga bersaing, produk dalam negeri ujungnya tergilas. Jadi solusi subsidi Harga menjadi sangat perlu dipertimbangkan untuk memberi motivasi petani agar semakin semangat dalam menanam kedelai.

"Saya sangat berharap, komoditas yang menjadi hajat hidup orang banyak ini mesti serius pemerintah menanganinya. Selain beras, kedelai ini juga menjadi andalan konsumsi masyarakat. pada kuartal I tahun 2001, Impor Kedelai sebesar 699.730 ton. Masih banyak yang mesti dibenahi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan kedelai", tutup Andi Akmal Pasluddin.



**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Kelangkaan kedelai yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun. Kondisi alam yang kurang mendukung dan ketergantungan impor semakin memicu persoalan yang tidak kunjung usai karena persoalan ini merupakan persoalan utama pada komoditas kedelai. Saya menyarankan ada perluasan lahan pertanian untuk kedelai dan pemberian insentif agar petani kedelai melihat ada harapan yang menjanjikan ketika menanam kedelai"

Legislator PKS **Kritik KLHK** Soal Klaim Peningkatan Index Lingkungan Hidup

KUTIPAN

"Kami mencatat jumlah timbunan sampah selama tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Sementara itu jumlah timbunan sampah yang terkelola baru mencapai 35,9 juta ton, artinya masih terdapat sampah yang tidak terkelola mencapai 31,9 juta ton," ujar Slamet

Jakarta (18/06) — Anggota Komisi IV DPR RI asal FPKS, Slamet mengkritik klaim capaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurutnya, fakta dilapangan justru berbanding terbalik dengan klaim tersebut khususnya terkait persampahan.

Hal itu dikatakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI Panja Pencemaran Sampah dan Limbah dengan pemerintah pengelolaan serta pencemaran sampah dan limbah, terkait masukan panja mengenai pengelolaan serta pencemaran

sampah dan limbah, Rabu (16/06/2021)

"Kami mencatat jumlah timbunan sampah selama tahun 2020 mencapai 67,8 juta ton. Sementara itu jumlah timbunan sampah yang terkelola baru mencapai 35,9 juta ton, artinya masih terdapat sampah yang tidak terkelola mencapai 31,9 juta ton," ujarnya di gedung DPR Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut drh Slamet menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sudah darurat sampah sehingga KLHK harus mencari strategi out of the box untuk mengatasi masalah sampah tersebut bukan menyempaikan data index untuk menutupi persolan sebenarnya.

"Memang perlu diakui persoalan sampah hanya salah satu dari penyusun indeks lingkungan hidup akan tetapi kalau dilihat secara lebih detil persoalan sampah merupakan driving force utama persoalan lingkungan. Belum lagi persoalan validitas data yang masih menjadi momok bagi perhitungan indeks-indeks tersebut sehingga patut dicurigai hasil perhitungannyapun tidak akan valid," paparnya.

Persoalan sampah, imbuhnya, perlu pendekatan secara terstruktur dan sistematis melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"KLHK perlu membangun program-program yang mampu mengatasi persoalan dilapangan misalnya pengembangan startup yang bergerak di bidang pengelolaan sampah untuk memaksimalkan ekonomi sirkular dari sampah," ujar Slamet.

Sebelumnya, KLHK mengklaim telah terjadi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 66,55 menjadi 70,27, Indeks kualitas air dari 52,62 menjadi 53,53, rehabilitasi DAS, dan penurunan emisi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

"Memang perlu diakui persoalan sampah hanya salah satu dari penyusun indeks lingkungan hidup akan tetapi kalau dilihat secara lebih detil persoalan sampah merupakan driving force utama persoalan lingkungan. Belum lagi persoalan validitas data yang masih menjadi momok bagi perhitungan indeks-indeks tersebut sehingga patut dicurigai hasil perhitungannyapun tidak akan valid,"

Peningkatan Limbah B3 Medis saat Pandemi, **Aleg PKS Dorong Pemerintah Lakukan Penanganan**

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyoroti permasalahan peningkatan sampah dan limbah B3 medis masa Pandemi Covid-19.

Johan berharap pemerintah tidak hanya perhatian pada persoalan sampah rumah tangga dan limbah industri.

"Limbah medis di Indonesia ternyata masih sulit ditangani dan pada saat masa pandemi ini limbah medis terus mengalami peningkatan dan pemerintah belum memiliki sistem manajemen pengelolaan limbah B3 medis pada masa pandemi yang telah berlangsung setahun lebih," ujar Johan.

Politisi PKS ini mengungkapkan sebelum masa pandemi, limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan (yankes) sekitar 170-200 ton per hari, namun pada masa pandemi ini limbah medis mengalami peningkatan sebesar 300-400 ton per hari atau meningkat sekitar 200%.

"Hal ini harus menjadi fokus perhatian pemerintah agar pencemaran sampah dan limbah medis segera ditangani dengan tata kelola yang lebih ramah lingkungan sebab jumlah bahan plastik yang mendominasi limbah medis mencapai 75%," ungkap Johan.

Johan selaku Anggota Panja (Panitia Kerja) tentang Pencemaran Sampah dan Lingkungan dari Komisi IV DPR RI menyayangkan masih banyaknya rumah sakit dan pelayanan kesehatan (Yankes) yang tidak disiplin dalam memilah sampah medis infeksius dan non-infeksius, yang terkadang pihak rumah sakit mencampurnya dalam satu wadah.

"Saya menyesalkan banyaknya limbah medis yang dibuang sembarangan di berbagai tempat penampungan,

bahkan terkadang mengalir ke sungai dan hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita semua", tutur Johan.

Legislator dari dapil NTB ini berharap pemerintah mendalami permasalahan limbah medis ini secara riil di lapangan terutama terkait skema yang tepat untuk penanganan limbah B3 medis pada masa pandemic ini.

"Pemerintah perlu mengetahui dimana letak kesulitan rumah sakit mengolah limbahnya sendiri, sebab ternyata masih sedikit rumah sakit yang memiliki alat pembakaran limbah medis, dari 2900 rumah sakit dan 9000 puskesmas hanya sekitar 110 rumah sakit yang mempunyai tempat pembakaran limbah B3 atau insinerator," papar Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mendorong pemerintah mencari solusi jitu terkait penggunaan jenis teknologi pengolahan limbah medis di rumah sakit yang lebih ramah lingkungan.

"Sebab selama ini KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) selalu



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah perlu mengetahui dimana letak kesulitan rumah sakit mengolah limbahnya sendiri, sebab ternyata masih sedikit rumah sakit yang memiliki alat pembakaran limbah medis, dari 2900 rumah sakit dan 9000 puskesmas hanya sekitar 110 rumah sakit yang mempunyai tempat pembakaran limbah B3 atau insinerator"

mengarahkan penggunaan insinerator yang belum tentu ramah lingkungan karena alat tersebut mengeluarkan abu dan asap yang menghasilkan dioksin," ucap Johan.

"Saya minta pemerintah segera menemukan solusi agar pengolahan limbah medis lebih ramah lingkungan sebab limbah

medis ini bersifat infeksius sehingga perlu penanganan khusus yang dapat membunuh bakteri atau virus yang menempel di limbah medis tersebut, serta harus memperbaiki tata kelola limbah medis yang lebih steril dan tidak beracun selama masa pandemi ini," tutup Johan Rosihan.

INDONESIA ! DARURAT SAMPAH ●



PKS Mendorong Pemerintah Untuk Serius Menangani Kondisi Penumpukan Sampah

■ Timbunan Sampah per Tahun 2020 → **67,8** Juta Ton



→ Terkelola
35,9 Juta Ton



→ Tidak terkelola
31,9 Juta Ton

■ Kemungkinan Kedepannya

● Jika setiap tahun hanya terkelola sebanyak 53%, maka sebanyak 30 juta ton sampah akan tidak terkelola setiap tahun.

● Lebih dari 150 juta ton sampah yang akan tidak terkelola selama lima tahun ke depan.

● Hal ini akan menciptakan bencana lingkungan bagi air, udara, tanah, bencana sosial, ekonomi, pencemaran lingkungan dan juga pencemaran tanah.

Kontribusi Program Tol Laut Masih Minim, Anggota FPKS: Komisi V akan Evaluasi

KUTIPAN

Jakarta (15/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mengatakan kontribusi program tol laut masih minim terhadap perekonomian dan memangkas disparitas harga.

Karena itu, lanjut Sigit, Komisi V DPR RI harus mengevaluasi program tol laut yang sudah menghabiskan dana triliunan rupiah itu.

"Program tol laut yang sudah lebih 6 tahun berjalan ini belum bisa memangkas disparitas harga terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga-harga di Papua misalnya, indeks kemahalannya sangat tinggi, khususnya untuk bahan-bahan konstruksi. Ini menunjukkan bahwa tol laut belum bisa menurunkan harga barang. Karena itu, Komisi V harus mengevaluasi sejauh mana efektivitas program ini," Kata Sigit.

Sigit mengatakan dalam rapat dengan Kementerian PUPR beberapa waktu lalu terungkap bahwa sejumlah program di PUPR seperti Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) sulit dilaksanakan di Papua karena tingginya harga bahan konstruksi. Sehingga besaran bantuan yang diberikan kepada warga tidak cukup untuk membiayai perbaikan rumah.

"Data BPS 2020, provinsi dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tertinggi semuanya ada di Indonesia Timur seperti Papua dengan IKK 208,9, Papua Barat dengan IKK 129,6, dan Maluku dengan IKK 124,5. Sementara kabupaten dengan IKK tertinggi semuanya ada di Papua yaitu kabupaten Puncak dengan IKK 492,62, Puncak Jaya 449,5 dan Intan Jaya 438,3. Bisa dibayangkan betapa mahalnya harga barang-barang konstruksi disana, sehingga sulit untuk mengejar pemenuhan sarana dan prasarana karena costnya

terlalu tinggi," Kata Sigit.

Di sisi lain, kata Sigit, program tol laut juga tidak berdampak signifikan mendongkrak perekonomian. Padahal, anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah selama 6 tahun terakhir mencapai puluhan hingga ratusan triliun, mulai dari subsidi tarif tol laut hingga pengadaan kapal dan PMN untuk perusahaan kapal plat merah guna mendukung program ini.

"Kontribusi Tol Laut terhadap perekonomian masih rendah. Bahkan, Presiden Jokowi selalu penggagas program ini juga mengakuinya. Nilai tambah transportasi laut untuk PDB hanya 0,3 persen, kalah jauh dibanding transportasi darat dan udara yang masing-masing menyumbang 2,4 persen dan 1,62 persen untuk PDB." Kata Sigit.

Keberadaan tol laut, kata Sigit, juga tidak berdampak signifikan terhadap penurunan biaya logistik. Buktinya, biaya logistik Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia.

"Baru-baru ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

"Kontribusi Tol Laut terhadap perekonomian masih rendah. Bahkan, Presiden Jokowi selalu penggagas program ini juga mengakuinya. Nilai tambah transportasi laut untuk PDB hanya 0,3 persen, kalah jauh dibanding transportasi darat dan udara yang masing-masing menyumbang 2,4 persen dan 1,62 persen untuk PDB."

Indrawati mengakui kalau biaya logistik di Indonesia sangat mahal, yakni mencapai 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih dari biaya logistik di negara-negara kawasan Asean, termasuk Malaysia. Ini menunjukkan bahwa tol laut belum berdampak signifikan

terhadap penurunan biaya logistik padahal anggaran yang kita gelontorkan cukup besar. Karena itu program tol laut ini perlu dievaluasi dan dicarikan solusi terbaiknya agar bisa lebih bermanfaat tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran subsidi saja," Kata Sigit.

Aleg PKS: Pemerintah Harus Tinjau Semua Lahan Warga yang Dikonversi Jadi Hutan

KUTIPAN

Pekanbaru (22/06) --- Usai viralnya perjuangan Syahrul Aidi saat Hearing dengan Kementerian PUPR terkait lahan warga masuk dalam Hutan Produksi Konversi (HPK), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) langsung melakukan dialog 70 warga Desa Kualu Nenas yang terkena pembangunan jalan tol namun berstatus HPK.

Saat kunjungan pada Senin (21/06/2021) tersebut, Wakil ATR/BPN didampingi oleh Syahrul Aidi selaku anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng beserta pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Syahrul Aidi mengucapkan terima kasih BPN cepat tanggap merespon keresahan warga yang diperjuangkan di Komisi V saat itu. Dia berharap dengan kunjungan ini, ada langkah dan solusi konkrit atas persoalan yang ada.

"Namun itu, yang menjadi perhatian kita saat ini, usai mencuatnya kasus tanah warga terkena jalan tol tapi berstatus HPK, mencuat lagi ke permukaan kasus tanah warga lainnya di berbagai wilayah di Riau. Artinya, kejadiannya bukan terjadi disini saja. Namun banyak daerah lainnya," tegas Syahrul Aidi.

Dia melanjutkan, perampasan lahan warga jadi HPK karena ada lahan lain yang dijadikan Hutan Produksi Lainnya (HPL) pada tahun 2018 seakan menegaskan adanya

permainan mafia tanah di Riau. Dua juga meminta kasus ini juga diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN. Apalagi untuk lahan yang telah dikuasi masyarakat untuk pemukiman dan bercocok tanam.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra menegaskan, pembebasan lahan warga ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dari Kementerian ATR, BPN dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan terus menjalin komunikasi.

"Tiga institusi tersebut harus segera bertemu melakukan pertemuan agar target yang direncanakan pada bulan Desember 2021 Tol Pekanbaru - Bangkinang bisa diresmikan. Dari pihak PT Utama Karya menyampaikan sisa pembangunan ini diperkirakan akan memakan waktu lima bulan, artinya sebulan ke depan semuanya sudah selesai," terangnya.



H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

"Terima kasih BPN yang cepat tanggap merespon keresahan warga yang diperjuangkan di Komisi V saat itu. Dia berharap dengan kunjungan ini, ada langkah dan solusi konkrit atas persoalan yang ada. Namun itu, yang menjadi perhatian kita saat ini, usai mencuatnya kasus tanah warga terkena jalan tol tapi berstatus HPK, mencuat lagi ke permukaan kasus tanah warga lainnya di berbagai wilayah di Riau. Artinya, kejadiannya bukan terjadi disini saja. Namun banyak daerah lainnya"

Aleg PKS **Dukung** Tindakan Tegas Aparat Hukum Terhadap Pelaku Pungli Di Pelabuhan

KUTIPAN

Tasikmalaya (16/06) — Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (13/6/2021) siang.

Polisi ingin memastikan tidak ada lagi pungutan liar alias pungli terhadap sopir. Dalam sidak ini para sopir mengaku sudah tidak ada lagi pungli sejak Puluhan preman yang kerap mengambil pungli dari para sopir truk telah ditangkap aparat kepolisian.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menyatakan dukungan atas tindakan tegas aparat hukum terhadap pelaku pungli.

Menurutnya paska penangkapan pelaku pungli di Pelabuhan maka otoritas Pelabuhan harus memperketat pengawasan agar tidak kembali terjadi pemerasan kepada sopir-sopir truk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Apresiasi untuk aparat keamanan yang telah menindak

tegas para pelaku pungli di Pelabuhan. Supaya tidak kembali terjadi pemerasan di wilayahnya, maka Otoritas Pelabuhan harus terus memperketat pengawasan. Apapun alasan para pelaku pungli, tindakan mereka tidak dibenarkan secara hukum dan agama," kata Politisi PKS ini.

Toriq yang juga Tokoh Ulama di Kabupaten Tasikmalaya ini menerangkan bahwa pungli adalah perbuatan yang menzalimi orang lain dan merupakan kejahatan yang melampaui batas. Dalam surat Asy Syura ayat 42 Allah menegaskan bahwa orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas tanpa mengindahkan kebenaran maka ia akan mendapat balasan berupa siksaan yang pedih.

"Walaupun pun para

pelaku beralasan melakukan pungli untuk membantu mempercepat urusan orang lain, tetapi praktik tersebut mempunyai banyak unsur yang tidak dibenarkan. Di antaranya mengambil dari orang lain yang bukan haknya, merusak sistem tata kelola yang sudah terbangun, hingga berdampak pada merugikan negara dan lainnya," ungkapnya.

Senada dengan aparat keamanan yang melakukan penangkapan terhadap puluhan pelaku pungli di Pelabuhan Tanjung Priok, Toriq menyebutkan bahwa para pelaku akan dikenakan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindakan pemerasan dengan ancaman terhadap para pelaku yakni hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

"Perkiraan saya penangkapan puluhan pelaku pungli di Pelabuhan Tanjung Priok kemarin baru permukaan saja. Oleh karenanya Pihak aparat hukum harus mendalami dan membongkar kasus pungli di Pelabuhan bongkar muat lainnya di Indonesia, seperti



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

“Walaupun pun para pelaku beralasan melakukan pungli untuk membantu mempercepat urusan orang lain, tetapi praktik tersebut mempunyai banyak unsur yang tidak dibenarkan. Di antaranya mengambil dari orang lain yang bukan haknya, merusak sistem tata kelola yang sudah terbangun, hingga berdampak pada merugikan negara dan lainnya,”

Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Batam Center, dan yang lainnya,” imbuhnya.

Ia juga berharap Kementerian Perhubungan sebagai leading sektor agar segera memastikan bahwa

seluruh Otoritas Pelabuhan telah mengambil Langkah tegas untuk mencegah kasus pungli di wilayahnya. Kemudian terus meningkatkan tata kelola pelayanannya agar memperkecil potensi terjadinya kembali kegiatan pungli di Pelabuhan.

KILANG TERBAKAR, IMPOR MEROKET DAN DEFISIT DAGANG MIGAS MEMBENGKAK



PKS mendesak Pemerintah agar menaruh perhatian serius terhadap permasalahan Migas di Indonesia

■ Lifting MIGAS Merosot (Juta barel minyak ekuivalen per hari)



■ Impor MIGAS melonjak



MAR 2020 : MAR 2021
41,87% ↑

MEI 2020 : MEI 2021
213,61% ↑

■ Kilang Minyak Pertamina (KMP) Yang Terbakar (sumber: Kompas.com)



- 🔥 16 Februari 2014 KMP Dumai
- 🔥 5 Oktober 2016 KMP Cilacap
- 🔥 15 Agustus 2019 KMP Balikpapan
- 🔥 29 Maret 2021 KMP Balongan
- 🔥 11 Juni 2021 KMP Cilacap

■ Defisit transaksi MIGAS Mei 2021 terhadap Mei 2020 (y-on-y) naik > 1000%.

RDP Dengan Himbara, Aleg PKS Minta Bank Negara Berkontribusi Besar Untuk UMKM

KUTIPAN

Jakarta (15/06) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) meminta setiap bank ada kontribusi besar dalam mengembangkan UMKM di seluruh Indonesia.

Menurut Nevi, jumlah UMKM sangat besar sekali sekitar 65 juta unit dan yang tercatat dalam sistem digital baru beranjak sekitar 5 juta kelompok.

"Saat ini yang sangat concern terhadap pengembangan UMKM baru BRI. Dan Baru-baru ini BSI terlihat ada ikhtiar dalam memajukan UMKM dengan programnya. Saya minta BSI terus mengembangkan programnya sekaligus semakin banyak menarik calon nasabah dalam penyaluran kredit" tutur Nevi.

Nevi melanjutkan, Pada tahun 2020 Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro sebesar Rp28.800.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Triliun Delapan

Ratus Miliar Rupiah) kepada 12 (dua belas) juta pelaku usaha mikro.

"Sedangkan total anggaran yang disiapkan untuk BPUM tahun 2021 sebesar Rp17.340.000.000.000,- (Tujuh Belas Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Rupiah. Ia mempertanyakan, kepada BRI dan BNI, upaya untuk mempermudah penyalurannya," ungkapnya.

Ia mempertanyakan ini karena pada kasus di BRI, dalam penyaluran BPUM, untuk tahun 2020 ada 1.414 an lebih yang tidak mencairkan bantuan. Sehingga kejadian ini perlu di telusuri karena secara psikologis, orang Indonesia sangat tidak wajar kalau menolak bantuan pemerintah.

Upaya penyaluran bantuan pemerintah hingga 100% terlaksana mesti menjadi upaya maksimal sehingga program pemerintah terealisasi.

"Saya menduga, banyak pelaku UMKM yang tidak bersentuhan dengan Bank sehingga penyaluran tidak maksimal. Bank bisa saja menemukan pelaku UMKM yang saat diverifikasi pihak bank ternyata ada ketidakcocokan data karena UMKM ini sebagian besar adalah pelaku usaha informal dan tidak pernah pinjam ke bank. Kalau model seperti ini terjadi dan banyak sekali di Indonesia, kasian mereka yang benar-benar membutuhkan, tapi lewat begitu saja," ungkap Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan pada rekomendasi kunjungan kerja kepada Himbara oleh Komisi VI DPR, agar BUMN yang dikunjungi di waktu sebelumnya dapat menjalankan rencana kerja dengan efektif dan efisien yang

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

"Saya sangat mengharapkan, Bank Negara yang tergabung dalam himbara menjadi bank terdepan di Negeri Indoensia dalam memberikan pelayanan teknologi canggih, tetapi tidak memberi beban biaya seperti biaya tarik tunai, cek saldo dan sebagainya. Pengguna bank Negara saat ini semakin meluas merata di seluruh Indonesia. Himbara mampu memberikan dividen kepada negara secara nyata"

Politisi PKS Minta Pemerintah Lindungi UMKM dari Ancaman Predator

KUTIPAN

Jakarta (12/06) — Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ultra Mikro aktif melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari ancaman predator yang berpotensi mematikan UMKM.

BUMN Ultra Mikro (UMi) harus bisa menjadi sandaran usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menyelesaikan persoalan dan memfasilitasinya naik kelas.

Hal itu disampaikan Amin saat menjadi narasumber dalam acara sosialisasi program integrasi ekosistem ultramikro yang digelar Genpro (Global Entrepreneur Professional) di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (10/6/2021).

"Holding BUMN UMi dibentuk melibatkan Bank Rakyat Indonesia, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PMN)," ungkapnya.

Wakil Ketua DPP PKS Bidang Jatijaya itu mengungkapkan, tahun 2020, ada 15 juta nasabah usaha

ultra mikro yang mendapat akses pembiayaan dan 19,8 persen rasio kredit. Tahun 2024, BUMN Ultra Mikro ditargetkan membiayai 29 juta nasabah usaha ultra mikro dengan rasio kredit 22 persen.

Secara nasional saat ini terdapat 64 juta UMKM yang merupakan 99 persen dari usaha atau bisnis di Indonesia. Sebanyak 57 juta di antaranya adalah pelaku usaha ultra mikro.

"Ultra ini belum masuk mikro, karena saking kecilnya seperti orang jual gorengan, cilok, bakso dorong," katanya.

Wakil Rakyat dari Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu mengatakan, harus ada itikad politik dari pemerintah dan komitmen untuk membesarkan para

pelaku UMKM ini.

"Ini dikarenakan sampai saat ini menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, baru 11 persen UMKM atau sekitar 7,05 juta pengusaha yang dibiayai lembaga pendanaan formal. Sekitar 16 persen atau 10,25 juta UMKM masuk ke platform digital," ungkapnya.

Sementara menurut data Bank BRI, 11,4 juta UMKM terlayani perbankan dan lembaga jasa keuangan formal, lima juta UMKM pinjam ke rentenir, tujuh juta pinjam ke kerabat, dan sisanya belum tahu mau pinjam ke mana.

"Banyaknya jumlah pelaku UMKM ini sebenarnya bukan berita gembira, karena menandakan bahwa iklim bisnis di Indonesia belum sehat. Dengan PDB (Produk Domestik Bruto) Rp 15.434,2 triliun dan pendapatan per kapita yang lumayan, yang besar sekali sangat sedikit. Sementara mayoritas kecil-kecil," kata Amin.

BUMN Ultra Mikro (UMi) bisa mengambil peran dalam hal ini. Setidaknya ada lima indikator keberhasilannya.

"Pertama, holding BUMN UMi, harus mampu menjadikan



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Holding BUMN Ultra Mikro harus berperan aktif dalam melindungi UMKM dari ancaman predator, yaitu perusahaan-perusahaan besar termasuk raksasa platform digital yang mengancam eksistensi UMKM. Caranya dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM"

kinerja PT PNM, PT Pegadaian dan PT Bank BRI yang selama ini sudah bagus menjadi jauh lebih bagus lagi," jelasnya.

Ia pun menyarankan Holding BUMN UMi ini tetap mempertahankan karakteristik khas anggota yang terbuka cocok dan memberikan kenyamanan bagi nasabah

kecil. Kedua, BUMN Ultra Mikro ini harus mampu menjadi sandaran UMKM dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama dalam menjadikan UMKM bankable atau mudah mengakses pembiayaan perbankan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hutang Garuda 70T, Rafli Beri Penegasan Restrukturisasi

KUTIPAN

Jakarta (18/06) --- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Rafli Kande, menilai persoalan keuangan yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. harus segera diselesaikan.

Menurut Rafli, perusahaan pelat merah ini telah menghadapi kondisi berat dalam beberapa tahun ke belakang karena beban utang.

“Persoalan Garuda sudah sangat menyesakn dada. Sesungguhnya kita harus tahu karena kerugian Garuda bukan hanya di masa pandemi. Hari ini sudah tidak bisa dibendung lagi, bengkaknya (utang) sudah luar biasa,” ujar Rafli saat dihubungi pada Rabu malam, (16/06/2021).

Untuk menyelamatkan Garuda, Rafli menyebut perusahaan pelat merah itu mesti melakukan restrukturisasi secara menyeluruh. Restrukturisasi mencakup sisi manajemen, pelaksanaan teknis, hingga operasional.

Di sisi manajemen, Rafli meminta Garuda mengkaji

ulang pembayaran penuh gaji karyawan. Besaran beban operasional tersebut kini tak sebanding dengan pendapatan emiten lantaran frekuensi penerbangan terus menyusut.

“Jadi restrukturisasi ini bagaimana caranya melakukan efisiensi manajemen di tubuh Garuda,” katanya.

Garuda tengah menanggubumngnng beban utang mencapai Rp 70 triliun. Utang Garuda terus membengkak dan bertambah sekitar Rp 1 triliun per bulan. Beban paling besar berasal dari perjanjian kerja sama dengan lessor.

Garuda pun tengah menjajaki renegotiasi dengan lessor-lessor-nya untuk mengurangi tanggungan.

Selain renegotiasi dengan lessor, perusahaan tengah menghimpun sejumlah opsi

penyelamatan perusahaan. Opsi-opsi penyelamatan juga dirumuskan oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham terbesar Garuda.

Opsi pertama, Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh melalui suntikan pinjaman atau ekuitas. Opsi kedua, Kementerian BUMN menggunakan perlindungan hukum kebangkrutan agar Garuda bisa merestrukturisasi kewajiban utang, sewa, dan kontrak kerjanya.

Sedangkan opsi ketiga adalah langkah yurisdiksi. Terakhir, opsi keempat, Garuda Indonesia harus membentuk maskapai baru.

Rafli mengatakan Komisi VI telah mendengar adanya opsi-opsi tersebut. Ia berharap Kementerian BUMN menggodok keempat opsi itu karena masing-masing memiliki konsekuensi yang besar.

“Kita enggak rela kalau Garuda mati terbengkalai dan tidak diselamatkan,” ucapnya.



RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

“Persoalan Garuda sudah sangat menyesakn dada. Sesungguhnya kita harus tahu karena kerugian Garuda bukan hanya di masa pandemi. Hari ini sudah tidak bisa dibendung lagi, bengkaknya (utang) sudah luar biasa” Untuk menyelamatkan Garuda, mesti melakukan restrukturisasi secara menyeluruh. Restrukturisasi mencakup sisi manajemen, pelaksanaan teknis, hingga operasional.”

Aleg FPKS: Energi Harus Memberikan Solusi Dari Minimnya Pendapatan Negara

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Anggota Legislatif FPKS, Nurhasan Zaidi memberikan masukan kepada Dewan Energi Nasional (DEN) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi VII bersama DEN di DPR.

Dalam RDP tersebut Nurhasan mengawali pendapatnya dengan mendeskripsikan peta permasalahan DEN dan menjelaskan tugasnya sebagai anggota dewan untuk terus mengingatkan DEN agar senantiasa on the track dalam tugasnya.

“Sebenarnya dewan eksekutif di DEN ini pasti sudah tau ya peta permasalahan energi di Indonesia, terutama terkait maksimalisasi energi di Indonesia. Tapi ya, tugas kita sebagai anggota dewan untuk terus mengingatkan semua pihak terutama pemerintah agar senantiasa on the track pada tugas tugasnya,” tukas Anggota Komisi VII tersebut.

Menurutnya, dalam pengelolaan energi di Indonesia

jangsan sampai terjadi tumpang tindih kebijakan antara beberapa institusi yang terlibat, agar pengelolaan energi di Indonesia tidak terganggu.

“Ya di Indonesia itu kan ada dua institusi yang fokus pada pengelolaan energi yaitu DEN dan BPPT, ya harapannya antara kedua institusi tersebut jangan sampai ada kebijakan yang tumpang tindih. Saya berharap antar kedua institusi tersebut ada kebijakan yang sama, karena ini menyangkut energi jadi dalam pengelolaannya harus rapih dan maksimal,” pungkas Nurhasan.

Diakhir, ia mengharapkan DEN dapat memaksimalkan sumber daya energi yang melimpah di Indonesia agar nantinya energi dapat

memberikan solusi dari pendapatan negara.

“Karena tentang energi nasional kita ini kan masih cukup memprihatinkan, kita punya energi yang melimpah, namun, Pertamina kita justru bersaing dengan perusahaan perusahaan asing. Ini kan artinya kita harus lebih memaksimalkan pengelolaan energi di Indonesia, jangan sampai kita menjadi tamu di negeri kita sendiri. Sehingga harapannya nanti energi bisa menjadi solusi dari pendapatan negara kita,” tutup Nurhasan.



H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VII DPR RI

“Sebenarnya dewan eksekutif di DEN ini pasti sudah tau ya peta permasalahan energi di Indonesia, terutama terkait maksimalisasi energi di Indonesia. Tapi ya, tugas kita sebagai anggota dewan untuk terus mengingatkan semua pihak terutama pemerintah agar senantiasa on the track pada tugas tugasnya”





Tambahan Subsidi Gas 3 Kg Disetujui Pemerintah, Wakil Ketua FPKS: **Harus Disyukuri!**

KUTIPAN

Jakarta (12/06) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menyambut baik hasil rapat penetapan asumsi makro RAPBN 2022 sektor ESDM, Kamis, (10/06/2021).

Pasalnya, usulannya agar Pemerintah menaikkan besaran volume subsidi gas melon 3 kg untuk tahun anggaran 2022 disetujui.

Sebelumnya FPKS mendesak Pemerintah meningkatkan volume subsidi gas 3kg menjadi 7,50 hingga 8,00 juta metrik ton dari usulan Pemerintah yang hanya 7,40 hingga 7,50 juta metrik ton. Usulan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto dalam rapat pembahasan asumsi makro RAPBN 2022.

"Kami menyambut baik hasil hasil rapat tersebut karena salah satu usulan kami agar Pemerintah menaikkan anggaran subsidi gas melon disetujui. Angka yang ditetapkan ini persis sesuai dengan usulan kami. Ini tentunya dimungkinkan karena

dukungan dari fraksi-fraksi lain. Hasil ini merupakan salah satu bentuk perjuangan bagi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19 yang belum usai," kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan berdasarkan pengamatan lapangan, masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima gas melon 3 kg subsidi ini. Belum lagi harga yang harus dibayar masih jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Pemerintah. Salah satu sebabnya karena ada penyimpangan penyerapan oleh mereka yang tidak berhak.

Data subsidi gas melon 3 kg tahun 2020 terserap sebesar 7.14 juta metrik ton. Sedangkan untuk tahun 2021 APBN menganggarkan subsidi gas melon 3 kg sebesar 7.5 juta metrik ton yang diperkirakan

terserap lebih dari 95%-nya.

"Sebenarnya kebutuhan masyarakat lebih dari itu kalau kuota ini dibuka. Terbukti dengan munculnya isu kelangkaan dan melonjaknya harga gas melon 3 kg di lapangan. Karenanya Pemerintah cq. Kementerian ESDM harus meningkatkan sistem pengawasan barang bersubsidi (barang dalam pengawasan) ini. Kalau memang serius ingin menata pengelolaan subsidi ini," imbuh Wakil Ketua FPKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Selain itu Mulyanto menambahkan kuota ini perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi kelangkaan gas melon 3 kg di masyarakat.

"Kami sangat mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi mereka yang tidak mampu, karena berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan masih dibutuhkan masyarakat dan ekonomi masyarakat masih belum pulih," ujarnya.

Menurut Mulyanto, dirinya tidak sepakat dengan pandangan, bahwa subsidi untuk masyarakat itu hanya pemborosan, karenanya secara



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Sebenarnya kebutuhan masyarakat lebih dari itu kalau kuota ini dibuka. Terbukti dengan munculnya isu kelangkaan dan melonjaknya harga gas melon 3 kg di lapangan. Karenanya Pemerintah cq. Kementerian ESDM harus meningkatkan sistem pengawasan barang bersubsidi (barang dalam pengawasan) ini. Kalau memang serius ingin menata pengelolaan subsidi ini,"

bertahap harus dihapuskan.

"Justru sebaliknya Pemerintah harus selalu memberikan pemihak kan kepada masyarakat yang tidak mampu, yakni mereka yang terpinggirkan akibat proses

pembangunan yang belum ideal. Pembangunan mestinya mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Mulyanto.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



EVALUASI IZIN TAMBANG EMAS DI PULAU SANGIHE!

Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, (Filipina) serta berada di bibir Samudera Pasifik.



Anggota Komisi VII FPKS Mulyanto meminta pihak kepolisian mendalami keterkaitan antara kasus kematian Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontog, dengan surat permintaan pembatalan izin kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS), yang pernah diajukan Helmud kepada Menteri ESDM.

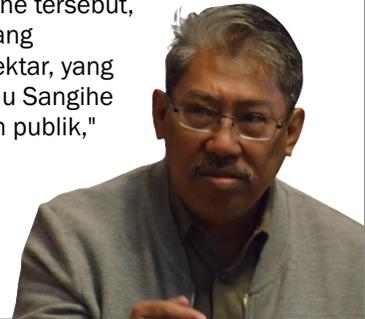


PKS mendorong Kementerian ESDM meninjau kembali aspek lingkungan dan keselamatan pertambangan izin tambang emas tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. PKS juga meminta, agar izin hanya diberikan pada wilayah yang benar-benar prospektif secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

KUTIPAN

Walau kita belum tahu secara pasti hasil autopsi pihak kepolisian perihal penyebab kematian Wakil Bupati Sangihe tersebut, namun izin pertambangan yang diberikan sebesar 42.000 hektar, yang lebih dari setengah luas pulau Sangihe ini patut mendapat perhatian publik,"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI



Covid-19 Masih Mengancam, HNW Sarankan Pendidikan Tatap Muka Madrasah Juga Ditunda

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Anggota Komisi VIII DPR yang juga Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa karena covid-19 masih menyebar ditambah dengan varian-varian barunya,

maka Kementerian Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran nomor 13 tahun 2021 yang membatasi dan meniadakan untuk sementara kegiatan sosial keagamaan di zona merah dan oranye.

Karena hal yang sama, lanjut pria yang akrab disapa HNW ini, Mendikbud-Ristek juga sudah menyampaikan kemungkinan Pendidikan Tatap Muka (PTM) di daerah-daerah tertentu yang semula direncanakan akan mulai dibuka pada bulan Juli, ada kemungkinan diundur.

"Maka sangat wajar bila Kemenag, karena alasan dan tujuan yang sama, juga segera mengumumkan penundaan kegiatan Pendidikan Tatap Muka (PTM) untuk Madrasah dan sekolah keagamaan di

bawah Kemenag, yang semula juga akan dibuka mulai bulan Juli," ungkapnya.

Apalagi, katanya, persiapan komprehensif untuk pelaksanaan PTM Madrasah mulai bulan Juli seperti validasi data soal vaksinasi untuk Guru dan tenaga pendidikan di Madrasah dll, belum dilaporkan juga oleh Kemenag untuk dikaji dan diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

"Mempertimbangkan perkembangan covid-19 yang makin meluas dan membahayakan, sementara vaksinasi untuk guru-guru Madrasah dan pengelola Madrasah belum tersedia data yang valid, persiapan-persiapan madrasah juga belum maksimal, maka sebaiknya PTM untuk Madrasah diundur, agar

disiapkan lebih baik lagi sehingga Madrasah tak menjadi kluster baru penyebaran covid-19, sampai covid-19 benar-benar sudah tidak membahayakan penyelenggara dan penyelenggaraan PTM," ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (17/06).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menjelaskan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, kasus konfirmasi positif dalam sepekan terakhir bertambah hingga 38,3 persen dan keterisian ruang isolasi naik hingga 27.43 persen dibandingkan minggu sebelumnya. Penambahan kasus baru pada pekan pertengahan Juni juga sudah hampir menyentuh 10.000 per hari.

"Apalagi di Indonesia sudah menyebar varian delta Covid-19 yang disebut epidemiolog sebagai varian super karena lebih cepat menular, menimbulkan keparahan, dan bisa menyalasi antibodi yang sudah terbentuk.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Mempertimbangkan perkembangan covid-19 yang makin meluas dan membahayakan, sementara vaksinasi untuk guru-guru Madrasah dan pengelola Madrasah belum tersedia data yang valid, persiapan-persiapan madrasah juga belum maksimal, maka sebaiknya PTM untuk Madrasah diundur, agar disiapkan lebih baik lagi sehingga Madrasah tak menjadi kluster baru penyebaran covid-19, sampai covid-19 benar-benar sudah tidak membahayakan penyelenggara dan penyelenggaraan PTM

Aleg PKS Minta Sanksi Tegas bagi Oknum Lurah dan Kades yang Terbukti Menyalahgunakan Bansos

KUTIPAN

Jakarta (18/06) — Anggota Komisi Sosial DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf merespons pengakuan Menteri Sosial (Mensos) Risma terkait persoalan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran.

Sebelumnya, Mensos mengaku bahwa banyak keluarga kepala desa hingga lurah yang menerima bantuan PKH. Menurut bekas Wali Kota Surabaya ini, hal itu disebabkan data penerima bansos terparkir di masing-masing pemerintah daerah.

Bukhori menilai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mutlak diperbaiki. Sebab itu ia meminta ketegasan Mensos terkait ini mengingat persoalan DTKS sudah berlangsung selama 10 tahun, tetapi masalah itu tidak kunjung selesai. Politisi PKS ini menambahkan, perbaikan DTKS sebaiknya tidak berhenti pada dua desil, tetapi diperluas hingga empat desil.

Untuk diketahui, desil 1

meliputi kelompok rumah tangga 'sangat miskin'. Desil 2 meliputi kelompok rumah tangga 'miskin'. Kemudian, desil 3 adalah kelompok rumah tangga dengan kondisi 'hampir miskin'. Selanjutnya, desil 4 adalah kelompok rumah tangga 'rentan miskin'.

"Perluasan desil diperlukan agar kita bisa memiliki data yang sempurna terkait kesejahteraan sosial kelompok masyarakat segmen bawah. Perlu ditekankan, memperbaiki DTKS maksudnya adalah untuk memastikan yang mana yang benar-benar masuk kategori tersebut, bukan sekedar nama masuk tanpa tervalidasi."

Anggota Baleg ini mengatakan, perbaikan DTKS

adalah untuk menghentikan penyaluran bansos yang salah sasaran di kemudian hari oleh kementerian atau lembaga yang bersangkutan.

"Sehingga, bisa dipastikan segmen kelompok masyarakat terbawah tertunaikan haknya tanpa berkurang sedikitpun," ujarnya.

Legislator dapil Jateng 1 ini juga menyoroti permasalahan di tingkat daerah yang membuat usaha pemerintah pusat terhalang dalam menghadirkan perlindungan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat di level akar rumput selama pagedbluk. Salah satunya, praktik politik balas budi yang masih dilakukan oleh oknum kepala desa, lurah, bahkan hingga pengurus RT dan RW.

"Setiap pemangku kebijakan harus meninggalkan unsur 'like dan dislike' dalam melayani warganya. Sikap subjektif berlebihan ini akan mengusik rasa keadilan masyarakat," lanjutnya.

Konsekuensi dari praktik politik balas budi ini, demikian Bukhori melanjutkan, adalah rusaknya tanaman sosial dan



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Tidak hanya praktik politik balas budi, praktik nepotisme menyangkut bansos oleh oknum lurah maupun kepala desa juga harus segera diakhiri. Demi kesuksesan program perlindungan sosial, kami mengharap seluruh aparat di bawah menghargai niat baik Menteri Sosial dalam memperbaiki data,"

moral masyarakat. Masyarakat yang sejatinya layak menjadi penerima manfaat bansos bisa terhalang memperoleh haknya akibat preferensi politik yang tidak sejalan dengan kepala desa ataupun lurahnya. Akhirnya, orang miskin yang dikorbankan. Bukan karena

kurangnya bantuan dari pemerintah, tetapi akibat sikap lencung oknum kepala desa ataupun lurah yang berdampak pada tata kelola penyaluran bantuan dari pemerintah pusat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anggota Komisi IX FPKS: Pelimpahan Anggaran Mitigasi Pandemi Beratkan Beban Daerah

KUTIPAN

Jakarta (11/06) --- Pemerintah Pusat akan menghentikan anggaran isolasi mandiri di tempat penginapan per 15 Juni 2021 dan akan melimpahkan beban tersebut ke pemerintah daerah. Hal ini tentu saja akan nambah beban daerah dalam banyak hal.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengungkapkan keprihatinannya.

"Gak hanya isolasi mandiri, bahkan 3T juga akan menjadi beban daerah," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/06).

Hal ini terungkap saat melihat rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan 3T dari APBN.

"Bahkan laporan realisasi anggaran untuk tes antigen TA 2021 dan testing PCR masih sangat rendah, di bawah 6 persen. Pada situasi status bencana nasional Pandemi serapan anggaran untuk testing juga masih sangat rendah bisa

menjadi masalah besar bagi mitigasi Pandemi C19," kata Mufida.

Ia juga menyebut catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan anggaran KCP PEN 2020 yang menyebut soal bermasalahnya perhitungan anggaran, keselarasan realokasi APBD dan persoalan kegiatan testing, tracing dan treatment.

"Catatan ini mengkonfirmasi ada persoalan di pelaksanaan 3T yang masih belum sesuai dengan standar WHO. Baik pada tahap Testing sampai dengan Treatment," jelas Mufida.

Ia menekankan, isolasi mandiri adalah salah satu bagian dari treatment, termasuk aktivitas test lewat

antigen maupun PCR.

"3T ini masih menjadi senjata ampuh dalam menangani Covid-19.

Seharusnya politik anggaran bisa lebih memihak bidang kesehatan ini," sebut dia.

Ia meminta keseriusan pemerintah dalam mengutamakan kesehatan dibandingkan sektor yang lain. Rendahnya serapan anggaran dalam 3T sementara pemerintah genar meminta rakyat wajib bayar 5M seperti sebuah kerja ironi.

"Rendahnya serapan anggaran untuk test mengkonfirmasi sejauh mana pemerintah ingin menyelesaikan Pandemi ini. Lewat jalan kesehatan sebagai panglima terkonfirmasi tidak. Seperti halnya Pemerintah menggunakan prioritas lain dan hasilnya seperti yang kita rasakan hari ini," papar dia.

Sementara soal rencana pelimpahan anggaran isoman ke daerah, Mufida mengingatkan agar tidak mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi yang kembali naik dalam bulan ini di beberapa daerah.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

"Rendahnyaserapan anggaran untuk test mengkonfirmasi sejauh mana pemerintah ingin menyelesaikan Pandemi ini. Lewat jalan kesehatan sebagai panglima terkonfirmasi tidak. Seperti halnya Pemerintah menggunakan prioritas lain dan hasilnya seperti yang kita rasakan hari ini"

Beberapa Pemda merencanakan akan menggunakan bangunan sekolah dan GOR sebagai tempat isolasi mandiri. Mufida mengingatkan agar fasilitas isolasi mandiri cukup memadai untuk memutus rantai penularan virus.

"Jangan sampai diserahkan ke Pemda, ternyata Pemda juga tidak mampu

sehingga malah dihilangkan program isolasi mandiri atau membuat program isolasi mandiri seadanya. Kalau penanganan dari sisi kesehatan terus dikesampingkan, anggaran sebesar apapun untuk menangani pandemi tidak akan memberikan dampak dalam penurunan kasus," kata dia.



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Penanganan Limbah Medis Buruk, Aleg PKS: Segera Antisipasi Agar Tidak Jadi Bom Waktu

KUTIPAN

Pemerintah harus segera tanggap dan ambil langkah antisipasi soal penanganan limbah sampah medis yang amburadul dan tidak sesuai standar. Jangan sampai menjadi bom waktu yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kita tidak ingin masalah limbah menjadi pemicu munculnya persoalan kesehatan lainnya," ungkap Netty dalam rilis medianya, Sabtu (12/06).

Jakarta (12/06) — Penanganan limbah sampah medis COVID-19 ditengarai tidak sesuai standar. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani meminta pemerintah ambil langkah antisipasi sebelum jadi bom waktu yang membahayakan kesehatan masyarakat.

"Pemerintah harus segera tanggap dan ambil langkah antisipasi soal penanganan limbah sampah medis yang amburadul dan tidak sesuai standar. Jangan sampai

menjadi bom waktu yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kita tidak ingin masalah limbah menjadi pemicu munculnya persoalan kesehatan lainnya," ungkap Netty dalam rilis medianya, Sabtu (12/06).

Menurut Netty, limbah medis yang tidak dikelola dengan baik dan aman dapat menyebabkan penyakit karena mengandung zat berbahaya seperti patogen, genotoksik, bahan kimia atau obat beracun

dan radioaktif.

"Pandemi COVID-19 tentu meninggalkan penumpukan limbah medis di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pengelolaan limbah ini membutuhkan sinergitas antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenkes, Satgas COVID-19 dan pmda terkait. Harus dilakukan pengecekan ke daerah-daerah apakah setiap fasyankes yang ada memiliki sistem pengolahan limbah medis yang standar," tambahnya

Kekhawatiran Legislator Dapil Jawa Barat VIII soal buruknya penanganan limbah medis beralasan. Beberapa hari yang lalu, sampah plastik hingga limbah medis bekas antigen COVID-19 berserakan di atas jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kabupaten Kudus.

"Kasus berserakannya sampah medis di Kudus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih waspada. Kita tidak ingin kasus ini seperti gunung es yang tampak di permukaannya saja," katanya.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

"Pandemi COVID-19 tentu meninggalkan penumpukan limbah medis di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pengelolaan limbah ini membutuhkan sinergitas antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenkes, Satgas COVID-19 dan pmda terkait. Harus dilakukan pengecekan ke daerah-daerah apakah setiap fasyankes yang ada memiliki sistem pengolahan limbah medis yang standar"

Aleg PKS: PPN Untuk Sembako Hanya Menambah List Ketidakadilan Pemerintah

KUTIPAN

Pontianak (13/06) — Wacana diterapkannya Pajak Penambahan Nilai (PPN) terhadap beberapa bahan pokok (sembako) dan juga pendidikan mendapat kecaman dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Alifudin, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Dapil Kalimantan Barat I.

Ditemui usai acara Sosialisasi Imunisasi, di Hotel G, jalan Jenderal Urip, Pontianak, pada hari Jumat (11/06/2021), Alifudin menyatakan

keberatannya terkait wacana kenaikan PPN untuk sembako.

"Kami sudah membaca, mendengar, dan melihat rancangan yang diajukan pemerintah yang masih dalam pembahasan di DPR, ya yang merencanakan tentang pajak sembako, kami menyerap aspirasi masyarakat Kalimantan Barat ya itu tidak setuju adanya pajak tersebut, karena sangat membebani masyarakat," ujarnya.

Alifudin menyayangkan, di

tengah kondisi masyarakat kecil dan menengah yang sedang berat, muncul kabar yang akan membuat mereka semakin khawatir. Karena dengan adanya PPN untuk sembako maka akan ada kenaikan harga, dan ini akan sangat memberatkan masyarakat kita.

"Ya bagaimana, kondisi masyarakat sudah tertimpa musibah pandemi lalu pajak yang untuk konsumsi pokok dinaikkan tentu dampaknya harga naik juga jadi kami sebagai wakil masyarakat Kalimantan barat tidak setuju kami akan memperjuangkan melalui fraksi PKS agar dibatalkan rencana ini,"

tambahnya.

Alifudin melihat, kebijakan PPN sembako menambah daftar ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat kecil, karena sebelumnya ada pengurangan pajak untuk barang mewah, sementara untuk bahan pokok malah dikenakan pajak.

"Jika ini diterapkan, makan akan menambah daftar ketidakadilan pemerintah. Karena ada ketidakadilan pajak barang mewah jadi nol contoh adalah pajak tentang mobil mewah ya kan, sehingga niatnya agar masyarakat bisa membeli mobil, yang kaya dinolkan yang untuk miskin dinaikan tarif inilah hal-hal yang kami tidak setuju jadi insya Allah kita akan berjuang melalui fraksi PKS agar rencana ini dibatalkan saja," Pungkasnya.



H. ALIFUDIN, S.E., M.M.
Anggota Komisi IX DPR RI

"Jika ini diterapkan, makan akan menambah daftar ketidakadilan pemerintah. Karena ada ketidakadilan pajak barang mewah jadi nol contoh adalah pajak tentang mobil mewah ya kan, sehingga niatnya agar masyarakat bisa membeli mobil, yang kaya dinolkan yang untuk miskin dinaikan tarif inilah hal-hal yang kami tidak setuju jadi insya Allah kita akan berjuang melalui fraksi PKS agar rencana ini dibatalkan saja"



PKS



**Akun Facebook Official
Fraksi PKS DPR RI**

BERPINDAH

dari **Fraksi PKS DPR RI**
menjadi

FPKS DPR RI



Kampus Merdeka Belum Sepenuhnya Menjawab Permasalahan Pendidikan Tinggi

KUTIPAN

Jakarta (20/06) —Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menilai kebijakan Kampus Merdeka diang-gap belum sepenuhnya menjawab masalah dunia pendidikan yang meliputi otomatisasi pembaharuan akreditasi, hak belajar tiga semester di luar prodi, otonomi pembukaan prodi baru pada PTN dan PTS serta kemudahan persyaratan menjadi PTN BH.

Dirinya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk meninjau ulang makna Kampus Merdeka, terutama ketika dihadapkan dengan makna otonomi kampus sesuai UU Pendidikan Tinggi. Dimana, penerapan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka membutuhkan perubahan paradigma dari sivitas akademika, sehingga tidak semua kampus dapat mengimplementasikan kebijakan ini.

"Kebijakan mekanisme

pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan dosen. Pengelolaan Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi di masa pandemi. Serta kesesuaian kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka terhadap substansi otonomi perguruan tinggi dan Tridharma sesuai amanat UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi juga menjadi fokus diskusi hari ini," urai Fikri di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/6/2021).

Dalam pertemuan dengan jajaran sivitas akademika Perguruan Tinggi Negeri (PTN),

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), perwakilan BEM dan mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Diponegoro (UNDIP), Fikri menjelaskan Kebijakan tersebut belum menjawab skema revitalisasi perguruan tinggi LPTK dan terkesan tidak sinergi dengan program Guru Penggerak.

Sementara itu Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNDIP Budi Setiyono mengatakan agar kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tidak terlalu kaku pada prosedur, sehingga esensi persoalan sendiri justru malah terabaikan.

"Analogi sederhananya seperti dalam sebuah project, ketika evaluasi justru yang lebih banyak dipertanyakan pemerintah (Kemendikbud-Dikti) justru masalah kelengkapan dokumen bukan fokus pada hasil capaian dari project tersebut," papar Budi.

la menambahkan, salah satu kesulitannya pada masa transisi di tengah pandemi ini memerlukan waktu agar mahasiswa lebih adaptif dengan



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Kebijakan mekanisme pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan dosen. Pengelolaan Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi di masa pandemi. Serta kesesuaian kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka terhadap substansi otonomi perguruan tinggi dan Tridharma sesuai amanat UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi juga menjadi fokus diskusi hari ini

program Kampus Merdeka ini.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih (PKS), didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng

Pramestuti (F-PDI Perjuangan), Mujib Rohmat, Muhammad Nur Purnamasidi (F-Golkar), Bisri Rully (F-PKB), Yoyok Sukawi (F-Demokrat), Sakinah AlJufri (F- PKS), Zainuddin Maliki (F-PAN) dan Rohji (F-PPP).

Sekolah Akan Dibuka, Aleg PKS: Pemerintah Terlalu Menumpukan Beban Kepada Daerah

KUTIPAN

Jakarta (10/06) – Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menjadi salah satu narasumber dalam acara talk show Dua Sisi yang ditayangkan oleh salah satu stasiun TV nasional dengan tema “Sekolah Dibuka, Akankah Jadi Petaka?” bersama tiga narasumber lainnya, Jakarta, Kamis lalu (10/06).

Mengawali pemaparannya, Ledia membahas mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang telah ditetapkan sebagai pedoman pembelajaran tatap muka. Ia menjelaskan bahwa SKB tersebut nantinya hanya akan menjadi sebuah payung, sehingga implementasinya tetap akan dikembalikan kepada masing-masing daerah.

“SKB itu kan hanya sekedar payung sementara implementasinya akan sangat tergantung dari kondisi dan kesiapan daerah masing-masing. Sementara tidak pula semua daerah memiliki

kapasitas untuk menentukan. Sehingga hal tersebut menimbulkan kritik bahwa keputusan ini terlalu menumpukan beban pada daerah tanpa memberikan tools dan pembekalan yang jelas dari pemerintah,” papar Ledia.

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini juga menyinggung sekolah-sekolah yang mulai membuat dan menerapkan modul baru untuk mempermudah kegiatan pembelajaran jarak jauh. Menurutnya, hal tersebut lebih baik dikordinasikan dengan penyatuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan

juga sinergi internal sekolah.

“Jika berbicara mengenai modul-modul yang diinisiasi sendiri oleh sekolah, seharusnya kita bisa memanfaatkan guru-guru mata pelajaran atau MGMP yang mana bisa bersama-sama, bersinergi membuat modul untuk kemudian dibagikan kepada guru-guru. Hal ini tentu akan lebih memudahkan karena merupakan bentuk kerja bersama. Plus, hal ini akan menjadi penguatan sinergi internal sekolah yang mengarah pada pemenuhan sarana dan prasarannya termasuk honor guru itu sendiri.” ujarnya.

Terakhir, Ledia juga memaparkan peran-peran orang tua yang ikut terbebani dengan transformasi cara belajar anak-anak mereka, terlebih bagi orang tua yang harus bekerja sehingga tidak memungkinkan untuk selalu melakukan pengawasan pada anak di jam sekolah.

“Sebenarnya ada atau tidak adanya PJJ ini pun peran orang tua sangat dibutuhkan bagi pengawasan sang anak. Namun kita tidak bisa



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

“SKB itu kan hanya sekedar payung sementara implementasinya akan sangat tergantung dari kondisi dan kesiapan daerah masing-masing. Sementara tidak pula semua daerah memiliki kapasitas untuk menentukan. Sehingga hal tersebut menimbulkan kritik bahwa keputusan ini terlalu menumpukkan beban pada daerah tanpa memberikan tools dan pembekalan yang jelas dari pemerintah,”

menampik bahwasannya ada orang tua yang tidak bisa selalu melakukan pengawasan dikarenakan bekerja dan hal-hal lain. Oleh karena itu, ini menjadi tugas besar bagi Kemendikbudristek pula untuk segera memperbanyak modul-

modul khusus dan meningkatkan kapasitas guru untuk menangani persoalan-persoalan ini dikarenakan pedagogik konvensional dan daring itu sangatlah berbeda.” Tutup Ledia.

Jadi Pembicara Bimtek CHSE, Sakinah Ingin Pelaku Wisata dan Ekraf Luwuk Amalkan Protokol

KUTIPAN

Luwuk (15/06) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Event dan Penerapan CHSE pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Banggai, Luwuk yang digelar di Hotel Santika Luwuk, Sabtu (12/06/2021).

Acara ini menghadirkan berbagai pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Banggai, Luwuk. Acara ini terselenggara atas kerjasama Komisi X DPR-RI dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang menjadi mitra Komisi X DPR RI.

Dalam pemaparannya, Sakinah mengatakan bahwa pemilihan kota Luwuk menjadi pilihan utama bimtek CHSE adalah karena potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Luwuk yang sangat besar. Ia pun menyampaikan pantun di

hadapan peserta bimtek:

Gegep gempita bedung bertalu | Nyanyian syahdu mojang priangan | Kemana hati kita berlalu | Di kota luwuk sudahlah tentu

Potensi pariwisata yang ada di Luwuk sangat luar biasa, ada air terjun Dendengan, air terjun Salodik, ada pulau dua yang sangat indah dan masih banyak lagi destinasi pariwisata lainnya.

"Daerah kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain, maka kewajiban kita adalah share dan kenalkan ke masyarakat luas agar tertarik untuk

berkunjung ke Luwuk," tuturnya.

Anggota Komisi X DPR RI Dapil Sulawesi Tengah ini menyatakan bahwa pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Sehingga potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Luwuk dapat segera dikenal oleh masyarakat luas.

"Semua stakeholder harus bergandengan tangan, pemerintah harus menggandeng pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif untuk memajukan pariwisata dan ekraf Luwuk," ungkap Sakinah.

Ia pun menambahkan pentingnya penerapan CHSE di semua sektor, "Tentu penerapan CHSE sangat penting di semua sektor, kita semua mempunyai peluang yang sangat besar untuk memajukan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Luwuk," ujarnya.

Sakinah pun mengingatkan pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti bimtek yang mayoritas adalah kaum hawa untuk selalu cerdas.

"Saya selalu mengingatkan



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

"Potensi pariwisata yang ada di Luwuk sangat luar biasa, ada air terjun Dendengan, air terjun Salodik, ada pulau dua yang sangat indah dan masih banyak lagi destinasi pariwisata lainnya. Daerah kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain, maka kewajiban kita adalah share dan kenalkan ke masyarakat luas agar tertarik untuk berkunjung ke Luwuk,"

ibu-ibu untuk menjadi perempuan yang cerdas," ungkapnya.

Lebih rinci Sakinah menjelaskan kalimat cerdas yaitu; Pertama Cekatan; "Kalau ada kesempatan untuk belajar segera belajar," ungkapnya.

Kedua, lanjut Sakinah,

Eksploratif. "Jangan katakan saya tidak bisa, kita punya potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus mencari tahu dan kembangkan potensi diri kita."

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg FPKS Soroti Minimnya Akses UMKM terhadap Pembiayaan Perbankan

KUTIPAN

Jakarta (14/06) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Kalimantan Timur mencermati data hasil survey Bank Indonesia tentang pembiayaan UMKM kepada perbankan yang dianggapnya masih minim.

Anis melihat bahwa sebagian besar pembiayaan UMKM masih berasal dari keuangan sendiri, yaitu 77% sedangkan sisanya 23% dari pihak lain termasuk perbankan.

"Jadi kalau kita lihat di sini lebih dari 50% itu masih dibiayai oleh sendiri sedangkan sisanya itu baru oleh pihak lain, antara lain adalah dari pihak perbankan," ujar Anis.

Menurut Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini data tersebut menggambarkan kondisi mayoritas UMKM yang masih unbankable (tidak dapat memenuhi syarat sebagai nasabah bank) sehingga mengalami hambatan untuk mendapatkan akses keuangan atau pembiayaan perbankan, sehi-

ngga perlu dicarikan solusinya.

Selanjutnya Anis memberikan perhatian terhadap tingkat pendidikan pendidikannya selaku UMKM yang rata-rata lulusan SD sampai SMA.

Menurut Wakil Ketua BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI ini, dengan tingkat pendidikan SDM UMKM ini, membuat mereka kesulitan mengimplementasikan program UMKM. Namun persoalan SDM ini bukan hanya di Kaltim tapi juga di seluruh Indonesia, dimana pelaku UMKM rata-rata berpendidikan setingkat SD sampai SMA.

"Sehingga, kepada seluruh stakeholder UMKM seperti BI, OJK, dan Kementerian Keuangan mari kita memikirkan

bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan," ujar Anis.

Lalu, ada hal yang menarik perhatian Doktor Ekonomi Islam lulusan Universitas Airlangga ini, yaitu tentang program Momprenneur yang merupakan program pemberdayaan wanita produktif untuk mewujudkan UMKM sukses. Momprenneur yang berupa program WUBI (Wirausaha Unggulan Bank Indonesia) yang menasar pada ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan korban rentenir di Kaltim," ungkapnya.

Anis ingin tahu lebih jauh tentang kondisi perempuan di Kaltim dan alasan Pemprov Kaltim memilih sasaran pada ibu-ibu, perempuan korban KDRT dan korban rentenir, serta perkembangan dari Momprenneur ketika mereka melakukan usaha melalui UMKM.

"Kemudian berikutnya terkait dengan PLB (Pusat Logistik Berikat), berdasarkan penjelasan perwakilan Bea Cukai Kalimantan Timur. Program PLB ini sangat didukung oleh Bank Indonesia. Apalagi PLB dapat meningkatkan daya saing terutama ekspor produk unggulan plastik, namun



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si
Wakil Ketua BAKN DPR RI

"Adanya beberapa permasalahan dengan data seperti data alamat penerima yang belum jelas, penerima BPUM yang berada di tempat terpencil sehingga mengalami kesulitan karena jarak ke Bank cukup jauh, serta adanya nomor induk kependudukan ganda, dimana semua masalah ini akan menghambat kemajuan UMKM

keberadaan PLB di Kaltim masih perlu disinergikan dengan semua program pengembangan ekspor, sejauh ini belum ada UMKM binaan Bank Indonesia yang memanfaatkan fasilitas PLB

artinya PLB ini belum dirasakan manfaatnya atau belum bersinergi dengan UMKM dalam hal ini UMKM binaan Bank Indonesia," papar Anis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS: Tingkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Keadilan Ekonomi

KUTIPAN

Menurut Junaidi, hal ini sangat penting untuk dilakukan sehingga berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Potensi ekonomi baru di dalam negeri harus terus digali demi mengurangi ketergantungan pada ekonomi global, sehingga pemulihan ekonomi di masa pandemi bisa terkendali," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (14/06/2021)

Jakarta (15/06) -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly, meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Junaidi, hal ini sangat penting untuk dilakukan sehingga berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Potensi ekonomi baru di dalam negeri harus terus digali demi mengurangi ketergantungan pada ekonomi global, sehingga pemulihan ekonomi di masa pandemi bisa terkendali," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, (14/06/2021)

Doktor Ilmu Pemerintahan ini menuturkan bahwa bagian terpenting dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yaitu

kualitas yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh golongan orang tertentu.

"Pertumbuhan ekonomi kita sulit dirasakan oleh rakyat menengah ke bawah karena adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Aleg Fraksi PKS ini meminta kepada pemerintah agar hadir dalam memudahkan akses untuk masyarakat kelas menengah ke bawah pada pusat-pusat produksi, distribusi hingga konsumsi sehingga mereka tidak terjebak secara turun temurun dalam pusaran kemiskinan.

"Perlu diwujudkan keadilan ekonomi sehingga distribusi kegiatan ekonomi merata dan dengan demikian pertumbuhan berkualitas dan inklusif dapat segera diwujudkan," ungkap Junaidi.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

"Bagian terpenting dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yaitu kualitas yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh golongan orang tertentu. Pertumbuhan ekonomi kita sulit dirasakan oleh rakyat menengah ke bawah karena adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi

Terkait Dana Alokasi Khusus, Wakil Ketua BAKN FPKS: Permasalahan Berulang, Harus Dicarikan Solusinya

KUTIPAN

Jakarta (17/06) — Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Institut Pertanian Bogor pada Selasa (15/6/2021).

Kunjungan kerja ini ditujukan untuk pendalaman dan mendengar masukan pakar mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah kepulauan. Dalam kesempatan ini rombongan BAKN bertemu dengan Arif Satria, Rektor IPB dan Nunung Nuryartono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang juga menjadi anggota Dewan Penelitian Nasional periode 2019-2022 dengan bidang keahliannya meliputi ekonomi pembangunan, keuangan mikro, dan kebijakan publik.

Dalam kunjungan kerja ini, Wakil Ketua BAKN, Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah di berbagai provinsi untuk mendengar dan menyerap keterangan dari mereka terkait realisasi DAK di

daerah.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menilai, terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi pemerintah daerah dan kemampuan pemerintah pusat.

"Ekspektasi pemerintah daerah terlalu tinggi dari kemampuan pemerintah pusat terhadap dana alokasi khusus ini," ujarnya.

Anis menjelaskan dalam rentang tahun 2017 sampai tahun 2021, kemampuan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana ke daerah hanya sekitar 13-18%. Yang tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 18%. Dari pengajuan Rp338,035 triliun, pagunya hanya Rp63,648 triliun (18,83 persen).

Menyoroti hal ini, Anis memastikan akan berdampak

pada proses pembangunan di daerah. Ia mengingatkan tujuan DAK sebagai bentuk desentralisasi fiskal yaitu agar pembangunan tidak terlalu senjang antara pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

"Sehingga pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini juga mengemukakan kendala teknis yang masih sangat banyak. Diantaranya juknis yang terlambat dikirim ke daerah. Saat pembangunan di daerah sudah berjalan, penjelasan dari pusat baru datang dan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap APBD.

"Teknis seperti ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan," kata Anis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Wakil Ketua BAKN DPR RI

"Terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi pemerintah daerah dan kemampuan pemerintah pusat. Ekspektasi pemerintah daerah terlalu tinggi dari kemampuan pemerintah pusat terhadap dana alokasi khusus ini. dalam rentang tahun 2017 sampai tahun 2021, kemampuan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana ke daerah hanya sekitar 13-18%. Yang tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 18%. Dari pengajuan Rp338,035 triliun, pagunya hanya Rp63,648 triliun (18,83 persen)."



Profil

- Nama Lengkap
Dr. H. Hidayat Nur Wahid, MA.
- Tempat, Tanggal Lahir
Klaten, 08 April 1960
- Dapil
DKI Jakarta II



Pendidikan

- SDN Kebondalem Kidul I, Klaten, Jateng. 1972
- Ponpes Wallsongo, Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. 1973
- Ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jatim. 1978
- IAIN Sunan Kalijaga Fak. Syarif'ah, Yogyakarta, 1979.
- S1 - Univ. Islam Madinah, Fak. Dakwah dan Ushluuddin, Saudi Arabia, 1983.
- S2 - Univ. Islam Madinah, 1987.
- S3 - Univ. Islam Madinah, Saudi Arabia. 1992.



Riwayat Organisasi

- Anggota PII, 1973
- Andalan Koordinator Pramuka Gontor Bidang Kesekretariatan, 1977 - 1978
- Training HMI IAIN Yogyakarta, 1979
- Sekretaris MIP PPI Madinah, Arab Saudi, 1981 - 1983
- Ketua PPI Arab Saudi, 1983 - 1985
- Ketua Yayasan Al-Haramain, 1994
- Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMi Pusat
- Ketua Dewan Penasehat IKADI
- Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor
- Anggota Dewan Penasehat KAICIID (King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue), Wina, Austria
- Anggota Majelis Tinggi Muslim World League, Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi



HIDAYAT NUR WAHID



Keluarga

- Istri : **dr Diana Abbas Thalib, MARS.**
- Anak : **5 Laki-Laki
2 Perempuan**



Riwayat Pekerjaan

- **Wakil Ketua MPR RI, 2014 - 2019 & 2019-2024.**
- **Ketua Fraksi PKS DPR RI, 2012 - 2014.**
- **Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI, 2009 - 2012**
- **Ketua MPR RI, 2004 - 2009.**
- **Dosen Pascasarjana UMG**
- **Dosen Pascasarjana IAIN Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta**
- **Dosen Pascasarjana Univ. Islam Asy - Syafiyah, Jakarta.**



Media Sosial

- **f : Hidayat Nur Wahid**
- **@hnurwahid**
- **@hnwahid**
- **▶ : Hidayat Nur Wahid**

- **Deklarator PK, 1998**
- **Ketua MDP PK, 1998-1999**
- **Presiden PK & PKS, 2000-2004**
- **Ketua FPKS DPR RI, 2012-2014**
- **Wakil Ketua Majelis Syura PKS, 2015-2025**
- **Ketua Majelis Taklim/Mahkamah Partal, 2016-2021**

Ketua FPKS DPR RI Dapat **Anugerah Anggota Kehormatan** dari Perguruan Silat Red Beksi

KUTIPAN

Jakarta (15/06) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendapat anugerah anggota kehormatan dari Perguruan Pencak Silat Red Beksi.

Seremoni penobatan dipimpin oleh Ketua Perguruan RED BEKSI H Farid Bustomi, dengan menyematkan seragam pencak silat berwarna merah, di Markas mereka Serang Banten, Minggu (13/6/2021).

Menurut Ketua Perguruan Red Beksi Kiai Jazuli Juwaini layak menjadi anggota kehormatan Perguruan Red Beksi karena kiprah dan kepeduliannya selama ini yang sangat memperhatikan perkembangan pencak silat.

Bahkan, Anggota DPR RI Dapil Banten ini dinilainya begitu aktif mempromosikan pencak silat dengan mengundang kelompok-kelompok pencak silat untuk hadir di acara-acara Fraksi PKS nasional.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKS DPR RI, yang sejak kecil belajar pencak silat

ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi sebagai anggota kehormatan Perguruan Pencak Silat Red Beksi. Dirinya akan terus mendukung dan mempromosikan pencak silat sebagai khasanah budaya bangsa.

“Terima kasih kepada Red Beksi dan seluruh perguruan pencak silat khususnya di Banten atas penghormatannya menjadikan saya sebagai warga kehormatan. Saya sebagai wakil rakyat yang cinta pencak silat berharap agar seluruh perguruan dan pendekar pencak silat bisa bersatu menjaga pencak silat sebagai warisa budaya khususnya di Banten,” kata Jazuli.

Jazuli juga mengajak para pendekar pencak silat untuk bisa menjaga dan mengayomi masyarakat dengan menjunjung keteladanan pendekar.

“Keberadaan para pendekar silat di tengah masyarakat harus memberikan rasa aman dan bangga, bukan sebaliknya menimbulkan ketakutan. Kita harus munculkan pencak silat yang berbudaya dan bersahabat,” imbaunya.

Jazuli mengakui bahwa potensi dan kekuatan warga pencak silat cukup besar, karena ada beragam perguruan pencak silat di Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jika potensi ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik akan berdampak luar biasa bagi pemajuan budaya bangsa.

“Pencak silat harus terus menjadi bagian dari budaya Indonesia. Jangan salah, pencak silat yang awalnya budaya lokal kemudian menjadi budaya bangsa bahkan saat ini diminati beberapa negara dunia. Ini adalah perkembangan yang menggembirakan kita semua dalam rangka mengangkat marwah bangsa Indonesia di pentas dunia,” pesannya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

“Terima kasih kepada Red Beksi dan seluruh perguruan pencak silat khususnya di Banten atas penghormatannya menjadikan saya sebagai warga kehormatan. Saya sebagai wakil rakyat yang cinta pencak silat berharap agar seluruh perguruan dan pendekar pencak silat bisa bersatu menjaga pencak silat sebagai warisa budaya khususnya di Banten



Viralnya Bocah di Desa Kuntu

Aleg PKS: Pemerintah dan Pengusaha Perhatikan Kesejahteraan Karyawan

KUTIPAN

Pekanbaru (14/06) --- Desa Kuntu Darussalam Kabupaten Kampar mendadak viral sepekan terakhir. Itu terkait dengan beredarnya video tiga pelajar yang melakukan aksi bergelantungan di rel keranjang pengangkut buah sawit.

Tak ayal video itu mengundang perhatian hingga pemerintah pusat.

Salah seorang anggota DPR RI Dapil Riau II, Syahrul Aidi Maazat diminta DPP PKS untuk mengunjungi lokasi kejadian untuk memastikan kondisi real di lapangan.

Selaku utusan Partai di komisi bidang infrastruktur diharapkan partai dapat memberikan solusi masyarakat setempat.

Syahrul Aidi saat dihubungi pada Sabtu (12/6/2021) menjelaskan bahwa klarifikasi langsung dengan ketiga anak tersebut menyampaikan bahwa mereka saat itu hanya bermain di luar

jam sekolah. Dan itu masih di bawah pengawasan keluarga dan pekerja yang ada di lokasi kejadian.

"Kemarin saya langsung dialog dengan anak-anak dan para pekerja disana, mereka menyampaikan bahwa mereka hanya bermain. Kalau pergi sekolah mereka biasanya ada jalur khusus. Kalau air sedang surut, mereka melewati aliran sungai yang ada di bawah rel keranjang kelapa sawit tersebut. Jadi itu clear. Dan karena ini berada dalam kawasan perkebunan pribadi, maka fasilitas pemerintah tak bisa kita bangun," terang Syahrul Aidi.

Yang menarik perhatian

Syahrul Aidi, hikmah dari kejadian ini adalah terbukanya sisi lain dari pekerja perkebunan yang ada di Riau. Baik itu lahan perkebunan milik pengusaha secara pribadi atau pun telah memiliki badan hukum. Dia menyoroti tiga fasilitas mendasar yang harus disediakan oleh pengusaha di luar gaji yang pekerja dapatkan.

"Pekerja harus mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Tiga sektor ini harus diberikan oleh pengusaha. Jangan anggap dengan memberi. mereka gaji, semua telah selesai. Contoh di bidang pendidikan, jika anak dari pekerjanya sekolahnya jauh, maka disediakan alat transportasi berupa kendaraan. Kemudian fasilitas jalan dan jembatan juga diperhatikan" terang Syahrul Aidi.

Syahrul juga meminta agar tingkat kesejahteraan pekerja ini juga diperhatikan oleh pemerintah setempat. Jangan sampai nanti ketika masalah telah muncul, baru dipersoalkan.



H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

"Kemarin saya langsung dialog dengan anak-anak dan para pekerja disana, mereka menyampaikan bahwa mereka hanya bermain. Kalau pergi sekolah mereka biasanya ada jalur khusus. Kalau air sedang surut, mereka melewati aliran sungai yang ada di bawah rel keranjang kelapa sawit tersebut. Jadi itu clear. Dan karena ini berada dalam kawasan perkebunan pribadi, maka fasilitas pemerintah tak bisa kita bangun"

Hadir Pertemuan Kaukus Perempuan
Parlemen (KPP) Sumbar

Nevi: **Tingkatkan Kualitas Perempuan Indonesia**

KUTIPAN

Padang (15/06) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menyampaikan betapa pentingnya kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas diri,

masuk di berbagai bidang baik organisasi maupun institusi apapun pada acara pertemuan silaturahmi Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) wilayah Sumatera Barat.

Acara Silaturahmi yang dihadiri Nevi Zuairina ini berlokasi di Rumah Makan Sederhana Jalan Gor H. Agus Salim, Kota Padang yang dihadiri juga oleh Wakil Kota Padang dan Ketua DPRD Kota Padang, pada Sabtu 12 Juni 2021.

Legislatur asal Sumatera Barat yang duduk di Komisi VI DPR ini dalam sambutannya berpesan, agar KPP wilayah Sumbar di masa-masa yang akan datang, secara bertahap mewujudkan perempuan perempuan parlemen di Sumbar dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas

perempuan parlemen di sumbar sesuai UU dan fokus pada APBD yang responsif gender.

Selain itu, Nevi juga meminta agar para perempuan parlemen dapat menebarkan kebaikan sekaligus menyebarkan gagasan agar perempuan Indonesia terutama di Sumatera Barat semakin meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas pengetahuan, kemampuan berorganisasi hingga peningkatan kualitas ekonomi.

"Saya berharap, perempuan di Sumatera Barat dapat dijangkau sebanyak-banyaknya bersentuhan dan berkomunikasi dengan perempuan parlemen, sehingga akan menghasilkan pelayanan yang semakin luas dan merata untuk rakyat Sumbar", tutur Nevi.

Politisi PKS ini juga mengajak diskusi terkait dengan situasi terkini di Sumbar dan Nasional seperti Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang sudah di terapkan, termasuk isu pajak sembako, yang baru-baru ini sedang ramai dibicarakan.

Istri mantan Gubernur Sumbar ini juga meminta kepada setiap anggota KPP Sumbar untuk menguasai dan memegang teguh AD ART organisasi selama para anggota KPP tercatat di organisasi perempuan parlemen ini. Dengan misi dari Organisasi, diharapkan setiap anggota KPP akan berkontribusi pada perbaikan situasi pandemi yang saat ini masih terus berlangsung.

"Kita ketahui bahwa, efek pandemi covid-19 ini yang pertama terasa adalah kaum ibu-ibu. Merekalah yang memikirkan keseharian keluarga, baik suami dan anak-anaknya. Mari kita bersama-sama saling menguatkan usaha kita dalam kontribusi menyelesaikan pandemi dan



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Saya berharap, perempuan di Sumatera Barat dapat dijangkau sebanyak-banyaknya bersentuhan dan berkomunikasi dengan perempuan parlemen, sehingga akan menghasilkan pelayanan yang semakin luas dan merata untuk rakyat Sumbar"

bagai persoalan yang muncul di masyarakat terutama yang mendera kaum perempuan. Semoga, setiap langkah yang dilakukan, merupakan amalan terbaik

yang sekaligus memberikan sumbangsh perbaikan pada bangsa dan negara melalui daerah-daerah yang merupakan wilayah kerja kita masing-masing", tutup Nevi Zuairina.

Kunjungi Dapil, Hermanto Berikan Bantuan kepada Petani Kota

KUTIPAN

Padang (20/06) --- Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan

menyerahkan pengelolaan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bantuan Pemerintah kepada warga Perumnas Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Warga yang menerima program tersebut tergabung dalam KWT Mekar Sari II.

"Program P2L ini memang dirancang untuk memberdayakan masyarakat kota. Selain untuk tambahan penghasilan masyarakat, dengan program ini tersedia pangan yang berasal dari lahan-lahan pekarangan di perkotaan," ujar Hermanto dalam sambutannya usai penyerahan bantuan belum lama ini.

Melalui P2L, jelas Hermanto, penerima bantuan diberi modal untuk mengelola pekarangan rumah masing-masing dengan tanaman sayuran berumur pendek

seperti kangkung, bayam, kacang panjang, cabai dan macam-macamnya.

"Hasil panennya dijual. Semua hasil penjualan masuk kas kelompok dan dicatat," tutur legislator dari FPKS DPR ini.

Dana yang terkumpul di kas kelompok tersebut, lanjutnya, diputar kembali sehingga kas kelompok semakin lama semakin besar.

"Secara periodik ada keuntungan yang bisa dibagikan ke anggota sesuai kesepakatan. Namun sebagian besar dana terus diputar untuk keberlanjutan program ini," papar Hermanto.

Bila program ini berlanjut, katanya, diharapkan pangan tersedia dengan harga yang wajar.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

“Program P2L ini memang dirancang untuk memberdayakan masyarakat kota. Selain untuk tambahan penghasilan masyarakat, dengan program ini tersedia pangan yang berasal dari lahan-lahan pekarangan di perkotaan”



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan
ASPIRASI ANDA
DI HARI ASPIRASI
FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

Rofik Serahkan Bantuan CSR untuk Sekolah Alam Perwira di Purbalingga

KUTIPAN

Purbalingga (18/06) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto menyerahkan bantuan CSR untuk Sekolah Alam Perwira (SAP) di Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkong Purbalingga

Dalam kesempatan itu Rofik diwakili anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi PKS Tri Mulyantoro dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Aris Widiarso, acara penyerahan CSR dilakukan secara simbolis bersamaan dengan peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru dan Masjid Joglo pada Jumat (18/06).

CSR dari Pertamina sebesar Rp 100 juta ini merupakan kerjasama antara Kementerian BUMN dengan Komisi 7 DPR RI. Dana CSR ini dimanfaatkan untuk membangun ruang kelas baru Sekolah Alam Perwira Purbalingga.

"Sekolah Alam Perwira ini menjadi sesuatu yang selalu kita harapkan prestasinya, nyata antara siswa, guru dan alam akan mengeksplorasi

kemampuan anak secara langsung," kata Tri dalam sambutannya

Dia berharap, SAP akan meningkatkan kemampuan anak menjadi lebih kreatif dan membentuk karakter anak yang mandiri dengan nilai-nilai Islam dan akan melahirkan generasi-generasi Robbani.

Ketua Yayasan Insan Madani Purbalingga Rahmat Arifin menyampaikan terima kasih kepada Rofik Hananto. Pihaknya akan membangun masjid untuk menjadi pusat pembinaan akidah dan akhlak anak-anak.

Sudati dari Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kemangkong mengharapkan SAP bisa meningkatkan mutu kualitas pendidikan untuk menyongsong Indonesia Emas

2045.

Kepala Desa Gambarsari Umar Hamid menyatakan sangat mendukung program-program SAP karena SAP adalah tempat pengkaderan manusia yang tangguh akidah, ibadah dan akhlak.

"Dengan turunya dana CSR ini, saya berharap bantuan ini dapat membantu pihak sekolah dalam menyediakan sarana prasarana yang lengkap dan memadai bagi para siswa di sekolah ini," ungkapnya.

Rofik juga berpesan agar bantuan ini digunakan sebaik-baiknya dengan amanah dan profesional. Agar dana itu betul-betul bisa diwujudkan secara nyata.



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Bantuan ini digunakan sebaik-baiknya dengan amanah dan profesional. Agar dana itu betul-betul bisa diwujudkan secara nyata.



Tiga RT di Jakpus Lakukan Lockdown, Mufida Kirim Bantuan Bahan Prokes

KUTIPAN

Tokoh Masyarakat setempat Meutia Gumala menyebutkan, kondisi ini menyebabkan tiga RT yakni 08, 01 dan 02 di wilayah RW 03 harus menerapkan mikro lockdown. Akibatnya beberapa warga memerlukan pasokan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari serta bantuan alat-alat protokol kesehatan.

Beberapa warga yang terkonfirmasi positif harus dibawa ke Wisma Atlet, sementara lainnya menjalankan isolasi mandiri.

Tokoh Masyarakat setempat Meutia Gumala menyebutkan, kondisi ini menyebabkan tiga RT yakni 08, 01 dan 02 di wilayah RW 03 harus menerapkan mikro lockdown.

Akibatnya beberapa warga memerlukan pasokan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari serta bantuan alat-alat protokol kesehatan.

"Warga yang positif sudah mendapat bantuan sembako dari kecamatan dan walikota

sementara warga yang terdampak masih membutuhkan antara lain masker, bahan pangan dan vitamin," urai Meutia di Jakarta, Selasa (15/06/2021).

Meutia bersyukur Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri F-PKS Kurniasih Mufidayati mengirimkannya bantuannya untuk warga tiga RT di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran.

"Alhamdulillah, terimakasih kepada Ibu Dr Kurniasih Mufidayati dan tim atas bantuannya untuk warga kami yang terdampak lockdown di RT 8, 1, 2, RW 03 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat.

Warga sangat bersyukur mendapat paket Prokes, di tengah keresahan akibat banyaknya kasus positif di lingkungan. Semoga kasus ini tidak bertambah meluas, dan Allah beri keberkahan atas bantuan ini, serta kesehatan untuk kita semua," sebut Meutia.

Mufida mengatakan, kenaikan angka Covid-19 akhir-akhir ini adalah alarm bahwa kebijakan menarik rem darurat harus segera dilaksanakan.

"Semoga warga yang terdampak diberikan kesabaran saat harus lockdown. Tetap patuhi protokol kesehatan dan Satgas Covid-19 terus melaksanakan tracing lalu lakukan treatment terukur. Tracing jangan hanya berhenti di satu dua orang. Semakin jelas hasil test semakin tepat penanganannya," sebut Mufida.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Semoga warga yang terdampak diberikan kesabaran saat harus lockdown. Tetap patuhi protokol kesehatan dan Satgas Covid-19 terus melaksanakan tracing lalu lakukan treatment terukur. Tracing jangan hanya berhenti di satu dua orang. Semakin jelas hasil test semakin tepat penanganannya"



Perbanyak Jalur Sepeda di Jakarta, **Jangan Membongkarnya, HNW: Itu Kebijakan Lingkungan Hidup**

KUTIPAN

Jakarta (19/06) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II Hidayat Nur Wahid,

mendukung kebijakan jalur sepeda permanen yang diterapkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang disetujui oleh DPRD DKI dan juga didukung oleh masyarakat Jakarta dan komunitas2 gowes di Jakarta.

Apalagi, lanjutnya, kebijakan tersebut juga secara prosedur dan formal sudah dibahas dan disepakati dengan DPRD DKI, serta merujuk ke pola hidup sehat yang diamanatkan oleh Konstitusi.

"Adanya jalur sepeda yang permanen juga biasa ada di ibukota-ibukota negara maju di dunia. Tidak aneh kalau memperbanyak jalur sepeda di Jakarta juga menjadi program Jokowi saat maju jadi calon Gubernur DKI," tegas HNW.

Terkait kesesuaian dengan konstitusi, HNW sapaan akrab-

nya merujuk kepada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut berbunyi, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Kebijakan Gubernur Anies tersebut merupakan implementasi nyata untuk memenuhi hak warga di DKI Jakarta untuk mendapatkan sarana dan lingkungan hidup yang baik, aman dan sehat," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (19/06).

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa kebijakan ini juga implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Ketiga.

"HAM Generasi pertama itu mengatur hak sipil dan politik. HAM Generasi Kedua mengatur Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dan HAM Generasi Ketiga mengatur, salah satunya, hak atas lingkungan hidup yang baik," jelasnya.

HNW juga mengkritisi penilaian bahwa kebijakan jalur permanen untuk sepeda tersebut dinilai diskriminatif. Menurutnya, pembuatan jalur khusus sepeda tersebut merupakan kebijakan afirmatif untuk mendorong dan menggalakkan pola hidup sehat dan aman untuk masyarakat dengan beraktifitas menggunakan sepeda.

"Ini merupakan kebijakan afirmasi yang baik, selain mendukung kebijakan publik 'pro green' sehingga mengurangi polusi udara, juga untuk menjaga keamanan pesepeda yang selama ini sering merasa tak aman bahkan tersingkirkan oleh kendaraan bermotor dan transportasi publik yang memproduksi polusi udara,"



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Polri harus benar-benar mengambil langkah yang mengayomi, menghormati asas otoritas, profesional untuk mengambil keputusan yang benar2 lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup sehat, aman dan memperoleh sarana dan lingkungan hidup yang layak dan kondusif di Jakarta."

ujarnya.

"Bila jalur sepeda permanen yang hanya ada di beberapa jalan protokol di Jakarta tersebut dinilai diskriminatif, lalu bagaimana dengan jalan tol permanen yang ada dimana-

dimana dan hanya diperuntukan untuk kendaraan roda empat atau lebih? Apakah mau menyebut itu juga diskriminatif? Kan tentu tidak," tambahnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pusat Entrepreneur di Palas Segera Dibangun

KUTIPAN

Sibuhuan (20/06) --- Sebuah negara dapat dikatakan maju apabila pelaku entrepreneur berjumlah lebih dari 14 persen dari rasio penduduknya

Namun di Indonesia saat ini pelaku entrepreneur baru 3,1 persen sehingga perlu diadakan percepatan dan kemudahan agar pelaku ekonomi bisa meningkat jauh.

Melihat kondisi tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, menilai kaum pemuda di Indonesia harus mau merubah pola pikir.

"Awalnya ide ini datang dari anak saya yang memiliki jiwa bisnis. Dia orangnya sangat tertarik dengan dunia bisnis," kata Iskan Qolba Lubis sebelum peletakan batu pertama pembangunan Food Court A88, pusat pelatihan entrepreneur muda dan barber shop di Sibuhuan, Sabtu (19/6).

"Ada tiga pusat yang akan beroperasi nanti setelah gedung ini siap. Bukan hanya pusat makanan, tapi juga pusat pelatihan bisnis bagi kaum milenial," sebut Iskan.

Pembangunan pusat bisnis bagi kaum milenial kata purta asli Sibuhuan itu seiring

dengan konsep PKS untuk membangun dunia usaha.

Menurutnya dengan adanya dunia usaha, maka lapangan kerja bisa diciptakan sehingga akan mengurangi pengangguran.

"Pusat pelatihan bagi kaum milenial nanti diantaranya bagaimana cara dan berbisnis online, marketingnya, membangun jejaring dan lainnya. Nanti semua akan dipelajari terkait bisnis online," sebutnya.

Iskan menjelaskan, kekuatan ekonomi bangsa akan lahir dengan terciptanya generasi-generasi muda bermental baja, generasi yang berani mengambil jalan menjadi wirausaha muda. Bahkan tolak ukur kesuksesan suatu negara bisa terletak pada gejolak jiwa entrepreneur mudanya.

Iskan menyebut dengan berdirinya pusat entrepreneur yang boleh dikatakan pusat peradaban, nantinya akan merekrut kaum milenial sesuai misi PKS, memberikan

pelatihan bagi anak muda untuk beraktivitas positif, ketimbang mereka memikirkan yang negatif dan terjerumus memakai narkoba.

Sementara Usman Jakfar, Ketua DPW PKS Sumut mengapresiasi langkah yang dibuat Iskan Qolba Lubis.

"Ini adalah kerja nyata mengaplikasikan untuk merekrut entrepreneur muda," kata Usman Jakfar.

Wakil Bupati Padang Lawas, Ahmad Zarnawi Pasaribu, juga menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pusat entrepreneur tersebut.

"Program ini juga sejalan dan bisa mendukung program Pemkab Padang Lawas," kata Zarnawi.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

Pusat pelatihan bagi kaum milenial nanti diantaranya bagaimana cara dan berbisnis online, marketingnya, membangun jejaring dan lainnya. Nanti semua akan dipelajari terkait bisnis online



*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Sejumlah Bansos Salah Sasaran di Dapil, Bukhori Minta Perbaikan DTKS Segera Diselesaikan!

KUTIPAN

Semarang (21/06) — Banyaknya kasus penerima bantuan sosial tak tepat sasaran menjadi perbincangan hangat ditingkat daerah hingga pemerintah pusat.

Polemik tersebut menjadi fokus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VIII dengan mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera bertindak.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menerangkan bahwa tahun 2021 menjadi momentum bagi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau disebut 'Tahun Pendataan'.

Bukhori menuturkan, pihaknya sudah mendorong Menteri Sosial Tri Rismaharini agar segera menyelesaikan perbaikan DTKS di semua daerah.

"Data tersebut meliputi, data program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," sebut Bukhori.

Bukhori menilai, perbaikan DTKS adalah kunci untuk memecahkan polemik bantuan sosial yang salah sasaran, atau sekurang-kurangnya insiden/inclusion dan exclusion error bisa diminimalisir melalui pemutakhiran data.

"Dalam setiap raker, isu sentral yang selalu saya tegaskan pada Menkos Risma adalah konsistensi dan keseriusan untuk meningkatkan perbaikan data (DTKS). Secara teknis, salah satu caranya adalah semua data yang berasal dari kabupaten/kota yang telah melalui verifikasi, diterima saja dulu semuanya. Setelah itu, dilakukan verifikasi kembali untuk menentukan desil 1, 2, 3, 4, hingga 5," terangnya saat peninjauan evaluasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang

perberdayaan sosial di Kendal. Menurut anggota komisi sosial ini, proses verifikasi setidaknya melewati sejumlah tahapan.

"Pertama, data yang di-himpun oleh pihak pemerintah desa/kelurahan harus dimusyawarahkan dan diverifikasi dengan para pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan," ungkapnya.

Hasilnya, imbuh Bukhori, data tersebut disampaikan ke Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, Dinas Sosial sebenarnya bisa melakukan verifikasi ulang, namun tidak berhak melakukan penghapusan data. Data itu yang disampaikan oleh desa/kelurahan kepada Dinas Sosial kemudian diteruskan ke pusat untuk dilakukan verifikasi sehingga menjadi data terpadu.

"DTKS ini nantinya dijadikan pedoman Kemensos dan lembaga atau kementerian lainnya untuk menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang berhak menerimanya.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Bansos ini hanya diperuntukan bagi orang yang tidak mampu. Kesadaran sosial yang tinggi dari setiap pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa bantuan ini tidak jatuh pada orang yang salah sehingga menzalimi mereka yang berhak,"

Verifikasi data harus dipastikan dilakukan secara terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Selain itu, Ketua DPP PKS ini meminta agar semua pihak memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dalam mengawal penyaluran bantuan sosial di lapangan.

"Bansos ini hanya diperuntukan bagi orang yang tidak mampu. Kesadaran sosial yang tinggi dari setiap pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa bantuan ini tidak jatuh pada orang yang salah sehingga menzalimi mereka yang berhak," tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Syaikhu Serahkan Hewan Kurban Saat Kunker di Dapil

KUTIPAN

Selain kepada H. Zaini, hewan kurban juga diberikan kepada tokoh masyarakat lainnya, yakni Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Budiwanto dan Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta Arief Kurniawan, dan Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Budi MM. Kegiatan ini merupakan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Dapil Syaikhu yang dilaksanakan dari 18-20 Juni.

Karawang (22/06) — Jelang Hari Raya Idul Adha, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu menyerahkan hewan kurban di Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat, Ahad (20/6).

Penyerahan hewan kurban dilakukan di Banyusari, Karawang. Hewan kurban berupa sapi ini untuk masyarakat di tiga kabupaten yang menjadi dapil Syaikhu, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

"Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan hewan kurban untuk masyarakat di dapil. Semoga berkah dan

bermanfaat," ujar Syaikhu.

Syaikhu mengajak masyarakat, khususnya umat Islam untuk berkorban jika ada kemampuan. Apalagi di tengah situasi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

"Ayo kita berkorban jika ada kemampuan. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan," kata Syaikhu lagi.

Berkurban, lanjut Syaikhu, selain bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah SWT untuk meneladani Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as, juga wujud kepedulian sosial kita kepada sesama.

"Hewan kurban jadi bukti

komitmen kita peduli kepada masyarakat sekitar," tegas Syaikhu.

Tokoh Masyarakat Karawang H. Zaini mengucapkan terimakasih kepada Syaikhu yang kembali menyerahkan hewan kurban untuk masyarakat.

"Tahun lalu beliau juga berkorban untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Terimakasih kepada Pak Ustadz Syaikhu," ujarnya.

Selain kepada H. Zaini, hewan kurban juga diberikan kepada tokoh masyarakat lainnya, yakni Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Budiwanto dan Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta Arief Kurniawan, dan Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Budi MM. Kegiatan ini merupakan agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Dapil Syaikhu yang dilaksanakan dari 18-20 Juni.



H. AHMAD SYAIKHU
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII

"Berkurban, selain bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah SWT untuk meneladani Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as, juga wujud kepedulian sosial kita kepada sesama. Hewan kurban jadi bukti komitmen kita peduli kepada masyarakat sekitar,"



Aleg PKS Ajak Para Ulama dan Tokoh Masyarakat Berperan Aktif Refleksikan Cinta NKRI

KUTIPAN

Depok – Anggota MPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A dalam Agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI atau dikenal dengan Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapil) pada Ahad (30/5) di Rumah Makan Dapur Wongiri, Cilodong – Depok

Nur Azizah menyebutkan bahwa salah satu pilar dari empat Pilar MPR RI yaitu terbentuknya NKRI itu dapat terwujud atas jasa-jasa para ulama di Negeri ini. Untuk itu, Nur Azizah mengajak agar seluruh ulama di Indonesia kompak untuk senantiasa menjaga keutuhan bangsa.

“Jangan Sekali-kali kita warga Negara Indonesia melupakan jasa-jasa para pahlawan dan para ulama negeri ini. Jadi, Jas Merah dan Jas Hijau harus tetap kita miliki. Jadi jasa-jasa pemangku kepentingan dalam menegakan NKRI, kemudian kemerdekaan ini harus tetap dipertahankan, dijaga!”, tegas Nur Azizah.

Nur Azizah ajak masyarakat senantiasa mengamalkan

serta merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan NKRI dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pancasila merupakan dasar bernegara bagi seluruh umat beragama di Indonesia, serta kunci terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Serta dalam merefleksikan cinta NKRI para ulama harus berperan aktif dalam meningkatkan rasa nasionalisme sebagai umat beragama di Indonesia. Nur Azizah menambahkan bahwa, Empat pilar Negeri ini terdiri dari Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika merupakan kesatuan utuh dalam menciptakan kerukunan dan persatuan.

Sementara itu Hasan Bisri,

Ketua MUI Kecamatan Cimanggis yang turut hadir dalam agenda ini turut mendukung bahwa peranan ulama itu sangatlah penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Untuknya, agar terus dapat diingatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, dalam setiap kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, para ulama harus dilibatkan, agar dapat menuruskan nilai-nilai ke-Empat pilar ini di Masyarakat.

Harapan kedepan acara semacam ini untuk dapat juga diselenggarakan pada para khatib, para tokoh-tokoh agama. Karena beliau-beliau yang selalu dekat dengan masyarakat dan menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat sehingga para da', para khatib, disamping mengajarkan agama untuk mengajak bangsa ini untuk cinta negara dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, ”, papar Hasan Bisri.

Sementara itu, Imam Musanto, selaku Anggota DPRD Kota Depok yang hadir dalam Sosdapil, turut menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

“Jangan Sekali-kali kita warga Negara Indonesia melupakan jasa-jasa para pahlawan dan para ulama negeri ini. Jadi, Jas Merah dan Jas Hijau harus tetap kita miliki. Jadi jasa-jasa pemangku kepentingan dalam menegakan NKRI, kemudian kemerdekaan ini harus tetap dipertahankan, dijaga!”,

MPR RI ini sangat positif sekali, khususnya bagi generasi muda.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan yang terpenting adalah bagaimana aplikasinya setelah sosialisasi ini dapat bisa berjalan. Sangat penting untuk generasi muda karena nilai-nilai Pancasila ini untuk anak-anak muda kita sudah sangat jauh, karena saya mengkrecek

sendiri tatkalta saya menanyakan langsung, banyak anak muda kita tidak hafal Pancasila. Kemudian, saya juga menanyakan kepada mereka tentang budi pekerti, nilai-nilai agama sebagai basic masyarakat kita, ternyata mereka juga banyak yang tidak paham”, ungkap Imam.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Selamat Milad Alkhairaat Ke-91

30 Juni 1930 -
30 Juni 2021

Semoga tetap istiqomah
dan berkontribusi
mencerdaskan umat.

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Presiden PKS: Pajak Sembako Kebijakan yang Tidak Pancasilais dan Menyengsarakan Rakyat!

KUTIPAN

Syaikhu memandang arah kebijakan pajak di Indonesia semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. "Ini keadilannya dimana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan, dan pajak mobil mewah dibebaskan?"

Jakarta (11/06) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai bahwa wacana perluasan pajak (PPN) kepada bahan pokok atau sembako adalah kebijakan yang tidak Pancasilais dan menyengsarakan rakyat.

"Ini kebijakan yang tidak Pancasilais karena menciderai rasa keadilan! Dalam kondisi Pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat," tegas Syaikhu di Semarang, Jawa Tengah, 11/6/2021.

Syaikhu memandang arah

kebijakan pajak di Indonesia semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin.

"Ini keadilannya dimana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan, dan pajak mobil mewah dibebaskan?"

Syaikhu meminta Pemerintah memiliki rasa empatik dengan kondisi yang menghimpit rakyat.

"Di tengah kondisi

ekonomi yang semakin sulit karena pandemi, pajak sembako akan semakin menccekik ekonomi dan daya beli masyarakat bawah," kata Syaikhu lagi.

Seharusnya dalam situasi resesi seperti saat ini, insentif pajak untuk masyarakat menengah bawah diprioritaskan, "Kami di PKS mengusulkan agar pajak penghasilan masyarakat berpendapatan kurang dari 8 juta dihapuskan. Dan pajak sepeda motor ber cc kecil juga ditiadakan. Ini akan sangat membantu kelompok masyarakat bawah!"

Syaikhu juga mengingatkan kepada Pemerintah agar mengkaji secara komprehensif dampak dan risiko kebijakan pajak sembako sebelum diwacanakan ke publik dan diajukan ke DPR RI.

"Harus dikaji betul dampak dari kebijakan tersebut sebelum diletakkan ke publik dan DPR RI. Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan trust publik ke pada pemerintah," tutupnya.



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

"Seharusnya dalam situasi resesi seperti saat ini, insentif pajak untuk masyarakat menengah bawah diprioritaskan, "Kami di PKS mengusulkan agar pajak penghasilan masyarakat berpendapatan kurang dari 8 juta dihapuskan. Dan pajak sepeda motor ber cc kecil juga ditiadakan. Ini akan sangat membantu kelompok masyarakat bawah!"



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***